

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (STUDI KASUS DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2015-2019)**

SKRIPSI

OLEH :

ERMA JULAIDA HARAHAHAP

NIM : 0502173425

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (STUDI KASUS DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2015-2019)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH :

ERMA JULAIDA HARAHAP

NIM : 0502173425

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**


2021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (STUDI KASUS DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2015-2019)”. Erma Julaida Harahap, NIM 0502173425 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 09 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelas Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

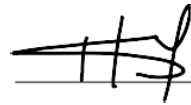
Medan, 09 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst., SHL., MA
NIP. 197907012009122003

Sekretaris



Hendra Harmain, M.Pd
NIP.197305101998031003

Anggota

Pembimbing I



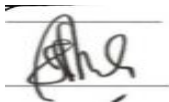
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst., SHL., MA
NIP. 197907012009122003

Pembimbing II



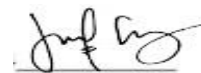
Nurwani, M.Si
NIP. 19890326019032010

Penguji I



Dr. Kamilah, S.E, Ak, M. Si
NIP. 197910232008012014

Penguji II



Laylan Svafina, M. Ak
NIP. 199108272018012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Uin Sumatera Utara
Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erma Julaida Harahap
Nim : 0502173425
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Baruhar Juli, 16 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Batang Baruhar Julu, Kec. Padang Bolak, Kab.
Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA STUDI KASUS DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



ERMA JULAIDA HARAHAP
NIM. 0502173425

ABSTRAK

Erma Julaida Harahap (2021) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara). Dibawah Bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Yenny Samri Julianti Nst., SHI. MA dan Pembimbing II Ibu Nurwani, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2015-2019. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal setelah melakukan analisis bisa dikatakan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 4,74% (2) Rasio Kemandirian Keuangan dengan pola hubungannya masih tergolong dalam hubungan Instrukturif karena rata-rata rasionya sebesar 7,07% (3) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Padang Lawas Sudah tergolong Efektif karena efektivitasnya diatas 100% yaitu 91,69% (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikatakan Efisien karena rata-rata efisiennya sebesar 94,74% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja modal sebesar 24% sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Kata Kunci: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohim

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kepada orang tuaku tercinta ayahanda Asman Harahap dan Ibunda Masitoh Hasibuan yang telah mempengaruhi seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst., SHI., MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus pembimbing skripsi I yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini serta berkat bimbingan para beliau inilah skripsi saya ini bisa sampai pada tahap terakhir atau sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan akan bermanfaat bagi semua orang, khususnya untuk penulis secara pribadi.

4. Bapak Hendra Hermain, S.E., M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Terutama kepada Ibunda Nurwani sebagai pembimbing skripsi II yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini serta berkat bimbingan beliau inilah skripsi saya ini bisa sampai pada tahap terakhir atau sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan akan bermanfaat bagi semua orang, khususnya untuk penulis secara pribadi.
6. Ibunda Kusmilawaty, M.Ak selaku Pembimbing Akademik (PA) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan pencerahan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada Kakakku Siti Rodiyah Harahap, A.Md Keb. dan abang ipar Mikrot Siregar, S.H yang telah banyak membantu penulis baik dari segi dukungan maupun material, serta abang Andri Halomoan Harahap, ST dan kedua adikku Firda Ramadani Harahap dan Safron Fauzi Harahap.
9. Keponakanku Raisa Putri Siregar dan Putra Kasta Ar-Rafi yang selalu menghibur dan menjadi teman bermain.
10. Kepada semua teman-temanku Kelompok 17 KKN Pak-Pak Bharat yang telah banyak memberikan motivasi dukungan kepada penulis.
11. Kepada teman-temanku Keluarga Besar AKS – F Angkatan 2017 yang sudah bersama-sama berjuang selama 4 tahun untuk sampai ketahap akhir. Semoga kita semua menjadi Sarjana yang bermanfaat.
12. Teman-teman dari PPM PALUTA, KAMMI dan PRAMUKA UINSU yang memberikan semangat dan bantuan setiap menemui kesulitan.
13. Dan terakhir penulis sampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi yang penulis susun ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya. Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal pengetahuan. Aamiin.

Wassalam,

Medan, 04 Juni 2021

Penulis



Erma Julaida Harahap

NIM : 0502173425

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	8
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	8
b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	10
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.....	11
d. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
a. Basis Akrual	13
b. Landasan Hukum Kinerja Keuangan	18
3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	26
a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	27
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	28
c. Rasio efektivitas PAD	30
d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	31

e. Rasio Keserasian	32
B. Penelitian Sebelumnya	33
C. Kerangka Teoritis	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	48
BAB VI TEMUAN PENELITIAN.....	50
A. Gambaran umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	47
1. Kondisi Geografi	47
2. Pemerintah	47
3. BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara	49
a. Sejarah Singkat	49
b. Visi dan Misi	50
c. Struktur Organisasi BPKPD	52
B. Deskripsi Data Penelitian	53
C. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Data Kemandirian Keuangan Kab. Padang Lawas Utara	5
2.1	Interval Skala Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	29
2.2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	30
2.3	Kriteria Efisiensi keuangan Daerah	33
2.4	Penelitian Terdahulu	34
4.1	Luas wilayah Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara	48
4.2	Tabel Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	54
4.3	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan daerah	55
4.4	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD	56
4.5	Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	57
4.6	Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi	58
4.7	Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran	41
4.1 Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara	49
4.2 Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem ekonomi daerah, dengan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang dari atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat.¹ Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dalam hal ini, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.²

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan anggaran yang akan diterima selama satu tahun dan anggaran yang akan dikeluarkan selama satu tahun fiskal. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran tersebut tertuang pada APBD. APBD (Anggaran

¹Utang Rosidi, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h 45.

²Abdul Halim, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama* (Yogyakarta: UMP AMP YKN, 2001), h.167

Penerimaan dan Belanja Daerah) berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Penyusunan dan Penetapan APBD Pasal 16 menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, APBD sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.¹ Landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU NO. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pertanggung jawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugas dengan baik.

¹Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 16, h.9

Kepentingan antara satu pengguna dengan para pengguna lainnya tidak sama sehingga informasi yang dicaripun berbeda.²

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan konsep dari *value for Money* dimana menyatakan bahwa organisasi sektor public harus memperhatikan konsep ini. Konsep *value for Money* ini merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.³

Realisasi pendapatan pemerintah daerah (Pemda) 17 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada triwulan IV 2015 mencapai Rp16,6 triliun atau 96,1% dari anggaran pendapatan 2015. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi dari capaian 2014 yang tercatat sebesar Rp16,2 triliun. Namun secara persentase, realisasi pendapatan ke 17 kabupaten/kota tersebut masih lebih rendah dari capaian 2014 yang mencapai 108% dari target anggaran pendapatan.⁴ Kabupaten Padang Lawas Utara atau lebih sering disingkat dengan “PALUTA” salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, adapun total PAD dari data kemandirian keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara seperti pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.1

Data Kemandirian Keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara

TAHUN	TOTAL PAD	PENGELUARAN DAERAH	RASIO PAD/TOTAL PENGELUARAN
2015	4.335.375.406	230.251.122.430,00	1,88
2016	5.317.408.207	304.213.108.647,00	1,75
2017	8.728.414.451	453.839.538.459,00	1,92

² Hendra Hermain, et. Al., *Pengantar Akuntansi I*, (Medan: Madenatera, 2019), h. 5.

³ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 4.

⁴ KEKR *Provinsi Sumatera Utara Bank Indonesia* h.47.

2018	12.798.137.843	571.471.637.184,00	2,24
2019	15.804.225.377	588.852.483.907,00	2,68

Sumber : BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara

Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Padang Lawas Utara, karena itu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan yang tertuang dalam APBD.⁵ Terdapat kegunaan dari Analisis rasio keuangan yang menyatakan bahwa, diantaranya:

- 1) Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

⁵Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. L-2.

- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama satu periode tertentu.⁶

Dasar yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektivitas PAD, rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan rasio Keserasian. Dengan adanya analisis dari laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah setempat dapat mempertahankan atau meningkatkan yang sudah diterimanya saat ini, dengan memperhatikan prinsip *value of money* yang terdiri atas ekonomi, efektivitas, dan efisien untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas Utara. Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara) tahun 2015-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu

⁶Dian Istyaningtias, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), h. 6.

melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.

2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara selama Periode 2015-2019 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Efisiensi ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara selama Periode 2015-2019 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?

3. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
4. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Efisiensi ?
5. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan peneliti dalam bidang Analisis Keuangan khususnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, dan penerapan teori Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya/potensi daerah. Penelitian ini dapat mengetahui hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kinerja satuan kinerja perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.¹ Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.²

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.³

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadimaupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik, apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya

¹Sumarjo, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010), h. 112.

² Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h.319.

³ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional*, Edisi Pertama. (Jakarta, Rajawalin, 1986) h.199.

sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.⁴

Dari beberapa pengertian di atas ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri.⁵

⁴Hendra Hermain, Aqwa Naser Daelay, dan Debby Tamara, "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Daerah", Vol.4 No.2, 2020

⁵Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional, Edisi Pertama*. (Jakarta: Rajawaliin, 1986) h.99

1. Kemampuan struktural organisasinya Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah.⁶

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:⁷

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

⁶Yonge Sihombing, *Manajemen APBD*. (Medan: Bina Media Perintis) h.17

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Pemerintah (Publik)*. (Bandung: UNIBRAW Malang 2002).h.212

- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam.⁸

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor-faktor individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama tim, kekompakan dan keeratn anggota tim.

⁸Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta Selemba Empat 2001).h.230

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi.
5. Factor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.⁹

d. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja dapat dimanfaatkan oleh oleh pihak interdal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggungkannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relavan dilakukan tindakan perbaikan.¹⁰ Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari Segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya:

⁹ Nur athiyah Rahma, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Prangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu", (Jurnal Katalogis Universitas Tadulako, Vol.4 No. 9, 2016), h. 18.

¹⁰Hendra Hermain, *et. al.*, dan Debby Tamara, "Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Daerah", Vol.4 No.2, 2020, h. 16.

jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

4) Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai

5) Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Basis Akrual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansal, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, sehingga dapat dinilai apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksikesalahan pembukuan sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-Sal dimaksud untuk memberikan ringkasan atas pemafaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan

3) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terceminikan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya desandingkan dengan periode sebelumnya. Penggunaan laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efesiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan sari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga menyusun Laporan Operasional. Laporan Operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/akortisasi, beban alat tulis kantor, beban transfortasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak dialokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban

operasional pada berbagai fungsi. Namun, jika Laporan Operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudnya penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasi beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer (penengah) dan atas dasar pertimbangan tertentu.

4) Laporan Perbandingan Ekuitas

Laporan Perbandingan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya posisi ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

5) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki suatu aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintah, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan aset nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

6) Laporan Arus kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum negara/daerah atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. Secara umum, struktur CaLK menggunakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Ekuitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama setahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
- f) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar; yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan Realisasi Anggaran, Laporan, Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Landasan Hukum Kinerja Keuangan

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka.¹¹

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan tersebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber *performance* rendah, sesuai dengan firman Allah SWT tentang kinerja dalam QS. Al-Ahqaf [46]: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمَا عَمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

¹¹ Syahman Sitompul, *et.al.*, *Akuntansi Masjid*, (FEBI UINSU PRESS 2015), h.65.

Artinya:

*“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.*¹²

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah SWT akan membalas setiap amalan yang dilakukan oleh masing-masing manusia. Sehingga, jika kalau dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah, adalah jika daerah tersebut dapat melaksanakan dengan baik manajemen keuangannya, maka daerah tersebut akan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan mendapat keuntungan bagi organisasinya. Dari ayat diatas bahwasanya setiap manusia atau organisasi yang bekerja akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Seperti Allah SWT akan menaikkan derajat bagi mereka yang bekerja.

Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: *shadaqoh, fa`i dan khumus*.

Bicara mengenai keuangan pada zaman Rasulullah SAW adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, keadaan Madinah sangat kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian.¹³ Pada masa Rasulullah saw, daulah mempunyai struktur administrasi yang mengurus kemaslahatan publik yang masih sederhana, diantaranya yaitu :¹⁴

1. Kepala Negara adalah Rasulullah saw sendiri, dibantu dengan *wazir-wazir* beliau.

¹²Q.S. Al-Ahqaf (46) : 19

¹³P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 486.

¹⁴Hizbu Tahrir, *Ajhizah Daulah*, Beirut, 2005, hal. 29.

2. Amirul Jihad. Kadang Rasulullah saw langsung seperti dalam beberapa *ghozwah*, adapun dalam *saraya* Rasulullah saw tidak menyertainya.
3. Industri, seperti pembuatan mimbar dan lain sebagainya.
4. Peradilan, termasuk didalamnya *hisbah*.
5. Baitul Maal, yaitu lembaga yang mengurus pendapatan dan belanja negara.

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Maal.¹⁵ Apa yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*.¹⁶ Baitul Mal dapat menjalankan kebijakan fiskal karena sumber penerimaannya tidak terbatas pada zakat saja, namun mencakup pula kharaj (pajak atas tanah), zakat, khums, jizyah dan penerimaan lainnya seperti kaffarah.

Berdirinya Baitul Maal sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah di Badr se usai perang dan saat itu sahabat berselisish tentang Ghanimah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِنَفْسِكُمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(١)

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (Q.s Al-AnFal : 01)

Pada masa rasulullah SAW Baitul Maal terletak di masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara. Karena pada saat itu belum ada

¹⁵M. Syafe'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, dalam Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23.

¹⁶Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 23.

tempat yang khusus untuk Baitul Maal, ini disebabkan harta yang masuk belum begitu banyak dan selalu habis dibagikan kepada umat Muslim serta dikeluarkan untuk pemeliharaan urusan negara. Dalam mengatasi inflasi selain menggunakan kebijakan moneter salah satu caranya juga dengan menggunakan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal ada tiga aspek dari kebijakan tersebut yaitu penurunan pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak dan mengadakan pinjaman pemerintah.¹⁷

Dalam masalah distribusi pendapatan memegang erat kaitannya antara penerimaan dan pembelanjaan/pengalokasian untuk kepentingan publik. Begitu pula Abu Ubaid dalam Kitab al- Amwal nya begitu jelas dan transparan dalam membahas masalah keuangan publik terkait sekitar masalah penerimaan dan pembelanjaan.

Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata, *“Telah berkata Umar RA bahwa tidak seorang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr: 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa’i). Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa’i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham.”*¹⁸

Selanjutnya, bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu delapan golongan yang disebut dalam al-Qur’an. Bagaimanapun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang yang

¹⁷Isnaini Harahap dan Marliyah, *Islam dan Isu Keuangan Kontemporer*, (FEBI UIN-SUPRESS, 2015), h. 91.

¹⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001).h.237.

memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan.

Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan *khumus* (*khumus ghanimah*, *khumus*, barang tambang dan *rikaz* serta *khumus* lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah saw dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

Setelah memutuskan untuk mengakhiri pengepungan benteng Thaif, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam kembali ke Ji’ranah tempat Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyimpan ghanimah (harta rampasan) perang Hunain sebelum berangkat mengepung Thaif.¹⁹ Setibanya di Ji’ranah, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak langsung membagi harta rampasan perang tersebut kepada para Shahabat yang ikut dalam perang Hunain kecuali perak yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sengaja menunda pembagian ghanimah ini beberapa hari, dengan harapan akan ada utusan dari kabilah Hawazin yang datang untuk menyatakan taubat dan menerima Islam. Namun ternyata tidak ada yang datang. Akhirnya *ghanîmah* dibagikan kepada kaum muhajirin dan para tawanan yang dibebaskan, sementara kaum Anshar tidak mendapatkan bagian sedikitpun.

Pembagian ghanimah seperti ini memantik kemarahan sebagian kaum Anshar sehingga terucap kalimat yang tidak selayaknya diarahkan kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Ketika berita tentang kaum Anshar dan ucapan sebagian mereka terdengar oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan mereka dan bersabda kepada mereka:

20

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَّغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكْتُوا، فَقَالَ

¹⁹Dinukil dari kitab *as-Sîratun Nabawiyah fi Dhau’il Mashâdiril Ashliyah*

²⁰HR. Al-Bukhâri, *al-Fath*, 16/170. no. hadits 4331 dan Imam Muslim, 2/736, no. 1059

بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ؟ قَالُوا
لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ : فَقَالَ رَضِيْنَا، قَالَ

Artinya:Wahai kaum Anshar! Pembicaraan apa ini yang sampai kepadaku dari kalian?! Kaum Anshar terdiam (tidak mampu menjawab). Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan sabdanya, “Wahai kaum Anshar! Apakah kalian tidak rela orang-orang itu pergi dengan membawa dunia sementara kalian pulang membawa serta nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke rumah-rumah kalian?”Mereka menjawab,“Tentu kami rela, wahai Rasûlullâh!” Perawi mengatakan, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Seandainya manusia menempuh satu lembah sementara kaum Anshar menempuh syi’b (jalan atau celah diantara dua pegunungan),maka pasti saya akan mengikuti jalan yang ditempuh kaumAnshar.” (H.R Al-Bukhari)

Kaum Anshar memahami maksud pembagian yang dilakukan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Namun orang-orang Arab badui (pedalaman) yang tidak memahami dan tidak terima dengan sistem pembagian itu. Salah seorang diantara mereka mengatakan kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam:²¹

يَا عَدِلُ، مُحَمَّدُ، فَقَالَ الرَّسُولُ لَهُ: وَيَلِّكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ أَكُنْ لَقَدْ خَبِثُ

Artinya:“Wahai Muhammad! Bersikap adililah!” Rasulullah n bersabda, “Celaka kamu! Siapakah yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil?! Sungguh saya akan merugi jika saya tidak berbuat adil” (H.R Al-Bukhari)

Mendengar kelancangan orang itu, Umar z mendatangi Nabi n dan meminta diijinkan untuk membunuh orang tersebut karena ditengarai sebagai orang munafiq oleh Umar bin Khattab z . Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam

²¹ HR. Al-Bukhâri, *al-Fath*, 12/236, no. 3145

tidak menyetujui keinginan Umar bin Khattab Radhiyalahu anhu. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Umar z.²²

مَعَاذَ اللَّهِ، أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَبِي أَفْتُلُ أَصْحَابِي

Artinya: Aku berlindung kepada Allah (dari) perkataan sebagai orang yang mengatakan bahwa aku telah membunuh para shahabatku. (H.R Bukhari Muslim)

Orang-orang arab badui ini yang terus berebut dan berdesakan saat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi ghanîmah, namun Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap sabar menghadapi mereka.

Setelah pembagian harta ghanîmah ini selesai dibagikan kepada orang-orang yang dipandang berhak menerimanya, utusan dari kabilah Hawazin datang menghadap Rasûlullâh menyatakan taubatnya dan menyatakan diri masuk Islam serta meminta agar harta dan para tawanan perang dikembalikan ke mereka. Mereka meminta ini karena harta itu adalah harta mereka yang berpindah tangan ke kaum Muslimin setelah mereka takluk dalam peperangan, sementara para tawanan itu adalah keluarga-keluarga mereka. Mendengar permintaan ini, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi pilihan kepada mereka antara meminta harta atau tawanan perang. Mereka lebih memilih tawanan di kembalikan kepada mereka. Akhirnya,

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan para shahabatnya untuk memusyawarahkan masalah ini. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta para Shahabatnya untuk mengembalikan para tawanan yang menjadi bagian mereka. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan dua opsi kepada para shahabatnya, mengembalikan para tawanan itu dengan sukarela tanpa meminta ganti dari Rasûlullâh atau mengembalikan sembari meminta ganti kepada Rasûlullâh dari ghanîmah yang lain. Semua para Shahabat mengembalikan para tawanan perang yang menjadi bagian mereka kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk dikembalikan kepada keluarga mereka dari kabilah Hawazin, kecuali dua orang yang mengembalikan namun meminta ganti.

²²HR. Al-Bukhâri, *al-Fath*, 12/238. no. hadits 3148 dan Imam Muslim, 2/733

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah dilakukan oleh para raja bangsa Arab dan non Arab tanpa pengecualian. Sebab, kebiasaan mereka adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Maqil, ia berkata, *“Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Siapakah yang telah kalian pungut cukai barang impornya? Ia berkata, “Kami tidak pernah mengenakan cukai atas Muslim dan Mua-hid. Saya bertanya, Lantas, siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya? Ia berkata, “Kami mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka.”*²³

Dari uraian di atas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari *usyur* (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, *“Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari usyur (2.5%).”*²⁴

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Suatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah shallallohu ‘alayhi wa salam bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya:

²³HR. Al-Bukhâri, *al-Fath*, 12/238. no. hadits 3148 dan Imam Muslim, 2/733

²⁴Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*). Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ). h.253.

“*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).*” (HR. Thabrani).²⁵

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah penting dilakukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD-nya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Apakah pemerintah daerah dalam penganggarannya telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja Keuangan Belanja Daerah bisa dikatakan baik apabila realisasinya lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam belanja daerah diperlukannya analisis keserasian belanja karena terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.²⁶

Dengan Berdasarkan informasi-informasi yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan Analisis Kinerja Anggaran Belanja Daerah dengan cara :

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

²⁵Hafidhuddin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), h. 40.

²⁶Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta:Selemba Empat 2001),h.231.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, skala interval seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 2.1

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan Daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”.²⁷

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah atau dapat dikatakan daerah tersebut semakin mandiri, demikian pula sebaliknya.²⁸

Rasio Kemandirian Keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dan alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman.²⁹

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

Rumus 2.2

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula

²⁷ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

²⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat :2007), h.232.

²⁹ Widodo, *Good governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era sesentralisasi dan otonomi daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h. 262.

sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

Rumus 2.3

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas seimbang
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target

penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.³⁰

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.³¹

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

Rumus 2.3

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

³⁰Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat:2007).h.234

³¹*Ibid.*,236

e. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara Optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna, jika judul-judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Untuk itu penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu guna mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain.

Tabel 2.4**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Nama Variabel	Hasil Penelitian
1	Tila Soraya, 2018.	Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012- 2016.	Kuantitatif	Hasil analisis kemampuan pendapatan asli daerah kabupaten batu bara dalam membiayai belanja daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah diperoleh hasil untuk tahun 2012 sekitar 3%, 2013 sebesar 4%, 2014 sebesar 5%, 2015 sebesar 6%, dan 2016 sebesar 5%. Hasil analisis kemandirian daerah menunjukkan PAD terhadap total penerimaan daerah dan pemerintah kabupaten bara memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, disebabkan belum optimalnya penerimaan dari pendapatan asli daerah kabupaten batu bara.
2	Mochammad Faisal, 2018	Kinerja Keuangan ada Pemerintah Daerah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Sleman secara

		Kabupaten Sleman tahun Anggaran 2010-2016.		umum dikatakan baik, yang dibuktikan dari Varians Pendapatan Daerah rata-rata diatas 100%, pertumbuhan pedapataan daerah rata-rata (positif).
3	Ika Nurhayat Putri, 2018.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang.	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masuk kategori sangat rendah, rasio ketergantungan berada di tingkat kategori sedang, rasio kemandirian keuangan sangat kurang, rasio keserasian keuangan daerah mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi, mengalami penurunan dan porsi belanja modal yang cukup kecil.
4	Muhammad Arifandi Rambe, 2018.	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2010-2018	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan rata-rata rasio kemandirian keuangan kinerja keuangan kabupaten deli serdang masih jauh dibawah harapan. Begitupula

berdasarkan rasio efisiensi dalam mengalokasikan belanja daerah. Namun secara umum berdasarkan rasio keserasian kabupaten deli serdang sesuai dalam proporsional kinerja keuangan, kemudian berdasarkan rasio pertumbuhan periode 2010-2018 mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerahnya.

5	Dian Istaniyaningtias, 2017.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di Jawa tengah tahun 2010-2014.	Deskriptif Kuantitatif	Kabupaten Banyuwangi dan Kota Tegal memiliki rasio kemandirian paling tinggi, dan kabupaten Blora dan kota Pe-kalongan paling rendah. Rasio efektivitas PAD, kabupaten Kendal, kabupaten pati, berada pada posisi tertinggi dan kabupaten tegal berada pada posisi terendah. Rasio pertumbuhan pada kabupaten bunjanegara dan kota pekalongan berada
---	------------------------------	--	------------------------	--

				<p>pada posisi tertinggi. Sedangkan kabupaten semarang dan kota Surakarta berada pada posisi terendah.</p>
6	Wenny Alvionita, 2017.	<p>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros</p>	<p>Deskriptif kuantitatif</p>	<p>Kinerja Keuangan Kabupaten Maros tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan intruktif, jadi rasio kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Maros relatif masih kecil berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah relatif tinggi. Kinerja keuangan Kabupaten Maros dilihat dari rasio Efektivitas PAD berjalan belum efektif karena rasionya masih dibawah 100%, dan dilihat dari rasio Efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa rata-rata efieinsinya dikatakan kurang efisien.</p>

7	Arthaingan H Muthia, 2016.	Pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Pada Kota Bogor Jawa Barat	Deskriptif	<p>-Derajat Desentralisasi kota Bogor tergolong mencapai peningkatan.</p> <p>- Rasio kemandirian tergolong konsultatif.</p> <p>-Rasio efektivitas tergolong efektif.</p> <p>-Rasio pertumbuhan menunjukkan PAD yang fluktuatif.</p>
8	D. Kartika IC Kusuma, 2015.	Analisis Rasio Kemandirian , Rasio EfektifitasPA D, Rasio Efisiensi PAD Terhadap Laporan Realisasi APBDKabupaten Sukabumi.	Deskriptif	<hr/> <p>-Kemandirian keuangan kabupaten Sukabumi tahun 2009-2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif.</p> <p>-Rasio efektifitas PAD menunjukkan bahwa kinerja keuangan kabupaten Sukabumi sangat efektif.</p> <p>-Kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi</p> <hr/>

tergolong cukup efisien.

9	Rosmitaty Tarmizi, 2015.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Setelah dan Sebelum memperoleh Opini WTP.	Kuantitatif	Hasil kinerja keuangan pemerintah daerah bandar lampung tahun anggaran 2008 -2012, maka dapat disimpulkab sebagai berikut : kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar lampung setelah Opini WTP berbeda dengan sebelum Opini WTP yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah kota bandar lampung setelah Opini WTP lebih baik sebelum Opini WTP.
10	Raja Assuriyan, 2015.	Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan	Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Teknik Analisis Uji Hipotesis	Rasio Kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Terhadap
Belanja
Modal.

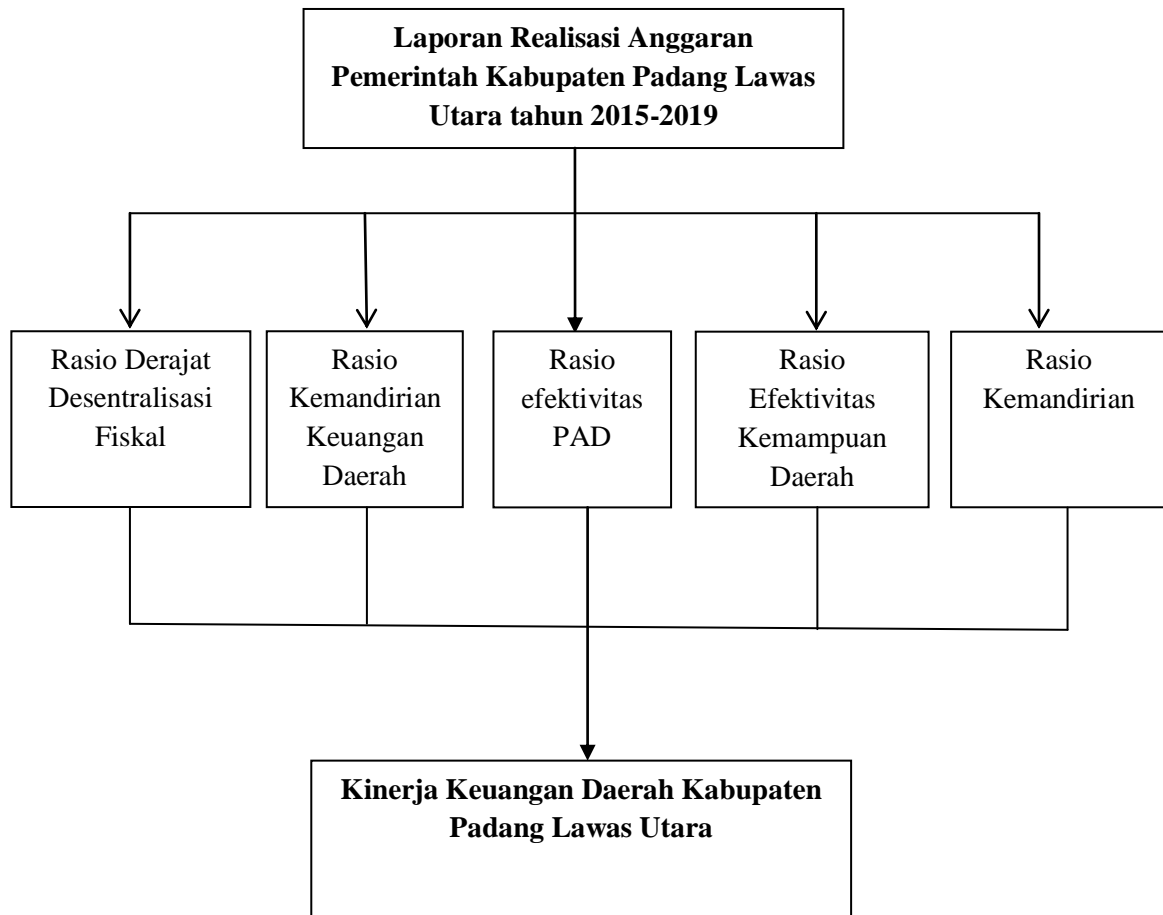
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tujuan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya. Pengukuran kinerja keuangan daerah merupakan suatu proses penilaian mengenai suatu target pelaksanaan dalam bidang keuangan daerah untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah menurut peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.³²

Untuk memperjelas konsep dan arah peneliti, maka kerangka pemikiran sebagai berikut:

³²Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM Y KPN, 2007), h 24.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diatas yang dimulai dengan bagan “Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara” yang mana diartikan sebagai sumber pokok yang akan diteliti. Laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran periode 2015-2019, selanjutnya adalah bagan yaitu proses pengolahan data yang tepat, ada lima macam rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Kekeragaman, dan yang terakhir adalah bagan “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” yaitu hasil akhir dari pengukuran rasio yang telah didapat setelah proses penghitungan.

Pengukuran kinerja keuangan ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat prestasi yang dicapai suatu daerah setelah menentukan target pencapaian. Target

pencapaian itu dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan agar pemerintah daerah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya. Menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan/kegiatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bidang keuangan untuk untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara:

- a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
- b. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
- c. Rasio Efektivitas PAD
- d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
- e. Rasio Kesera

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam kalimat.¹ Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable.²

Mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifiak dan lain sebagainya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan adalah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Jalan Lintas Gunung Tua –Padangsidempuan KM.3, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara 22753 Sumatera Utara.

¹Conny. R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2010) h.76

² Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press). H.18

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2021 sampai dengan selesai.

Table 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2020							2021						
		Jal	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Ja	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pengajuan Judul														
2	Bimbingan Proposal														
3	Seminar Proposal														
4	Bimbingan Skripsi														
5	Sidang Munaqosah														

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dalam kurun waktu 2015-2019.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informs atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan

fakta.³ Sumber data utama adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lainnya.⁴ Data adalah segala sesuatu bahan keterangan atau fakta yang sudah didapat di observasi. Misalnya dokumen daftar karyawan satu kantor, sebagai bahan informasi atau penelitian.⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer berupa hasil wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.

2. Data Sekunder

Yaitu data sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, literatur dan dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai :

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶ Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁷ Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat dengan objek yang diteliti yakni melakukan observasi guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi realitas sosial, berupa partisipasi maupun proses di lapangan.

³ Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2004, h.106.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.157.

⁵ Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa Untuk Penelitian tesis Desertasi* (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 123.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.302

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.139.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara diminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan hakekatnya.⁸Wawancara yang digumakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁹ Dokumen ini sebagai pelengkap atas hasil observasi dan wawancara. Bentuk dari dokumen ini beraneka ragam, seperti tulisan, gambar ataupun sebuah karya monumental. Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data gambar yang ada di Bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan Kabupaten Padang Lawas Utara. Dokumentasi merupakan satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisa isi dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

Hasil dari dokumentasi yang dilakukan berupa laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 samapi dengan tahun 2019.
- b. Neraca Tahun 2015 sampai dengan 2019
- c. Laporan Arus Kas tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

⁸ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h50

⁹ *Ibid.*, h. 326

¹⁰ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 49-50.

- d. Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

F. Teknik Analisis data

Analisis data pada penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.¹¹ Analisis data merupakan proses pencarian data dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹² Setelah data penelitian telah terkumpul maka dilakukan analisis data, analisis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran jawaban atas variabel-variabel yang diteliti dari data yang sudah terkumpul terkait dengan rumusan yang diajukan. Teknik analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah dan laporan realisasi tahun anggaran 2015-2019.

Dalam penelitian ini teknik analisis rasio keuangan yang digunakan adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi...*, h.317.

¹² *Ibid.*, h.333.

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dan alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Keresasian

Rasio Keresasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara Optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keresasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Kondisi Geografis

Secara geografis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2017 melalui Sidang 1 Paripurna DPR-RI telah disahkan sebagai daerah Otonomi baru melalui Undang-undang nomor 37 Tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai luas wilayah ± 3.918,05 km² populasi 252.589 jiwa dan secara geografis terletak pada 1°. 13'. 50" dan 20. 2'. 32" Lintang Utara serta 99°. 20'. 44" dan 100°. 19'. 10" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gambaran umum kondisi Padang Lawas Utara menjelaskan tentang tentang kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saling serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada dasarnya selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan, juga sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khususnya hasil pertanian dan perkebunan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera. Potensi ini sangat

penting sehingga perlu dibuat terobosan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.¹

2. Pemerintah

Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 9 kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan pada tahun 2008. Pada Tahun 2016 dimekarkan lagi menjadi 12 Kecamatan antara lain: Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat, Kecamatan Halongonan, kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Padang Bolak tenggara, Kecamatan Halongonan Timur, yang terdiri dari 386 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah kecamatan pada persentase terhadap total luas Kabupaten Padang Lawas Utara ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

**Luas wilayah Kecamatan
Kabupaten Padang Lawas Utara**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	%
1.	Batang Onang	485,00	12,38
2.	Padang Bolak Julu	196,44	5,02
3.	Portibi	246,13	6,29
4.	Padang Bolak	699,06	17,85
5.	Padang Bolak Tenggara	94,93	2,43

¹www.pemkabpaluta.go.id

6.	Simangambat	429,42	10,97
7.	Ujung Batu	269,62	6,89
8.	Halongonan	410,27	10,48
9.	Halongonan Timur	181,33	4,63
10.	Dolok	525,27	13,41
11.	Dolok Sigompulon	262,56	6,71
12.	Hulu Sihapas	39,05	09,97
	Total	3 198,05	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu dari hasil pemekaran Tapanuli Selatan dimana Kabupaten ini ber ibu kota di Gunung Tua dengan Bupati Andar Amin Harahap, S.Stp.,M.Si yang merupakan anak dari Bupati sebelumnya yaitu Drs. H Bahrum Harahap sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Walikota Padang Sidempuan dengan Wakilnya Drs. H Hariro Harahap S,E M.Si yang menang atas kolom kosong.²



² Profil Kabupaten Paluta, www.pemkabpaluta.com di akses Kamis 29 April 2021.

Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara

Lambang Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki makna dan arti:

- 1) Gunung atau lambang hijau lapangan hijau melambangkan luasnya daerah perkebunan dan Padang rumput untuk Peternak di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Gambar lembu dan kerbau melambangkan daerah Kabupaten ini terkenal dengan kemakmuran rakyatnya, dimana rata-rata masyarakat Padang Lawas Utara berpotensi sebagai peternak dikarnakan padang rumput yang luas.
- 3) Gambar rumah, dalam bahasa daerah sopo godang merupakan tempat masyarakat untuk melakukan sidang, musyawarah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, Padang Lawas Utara terkenal dengan masyarakatnya yang konon selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
- 4) Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga termasuk penghasil beras di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Warna hijau melambangkan mayoritas penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara Muslim angkola batak.

3. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Padang Lawas Utara

a. Sejarah Singkat

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomer 65 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Setdaprovsu yang merupakan salah satu SKPD dilingkungan Sekeretariat Daerah

Provsu. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomer 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomer 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekdaprovsu dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Sehubungan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BPKPD adalah singkatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah. BPKPD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan daerah. BPKPD biasa disebut dengan dinas pendaptan daerah.³

b. Visi dan Misi

Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit perangkat daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

³*Bpkpd Padang Lawas Utara, 2021*

Daerah serta Pengelolaan Aset Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi dibawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Wajardan Transparan”

Kata kunci dari visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme di dalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Bidangnya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan.

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memperhatikan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan.
- 2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur.
- 3) Peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah.

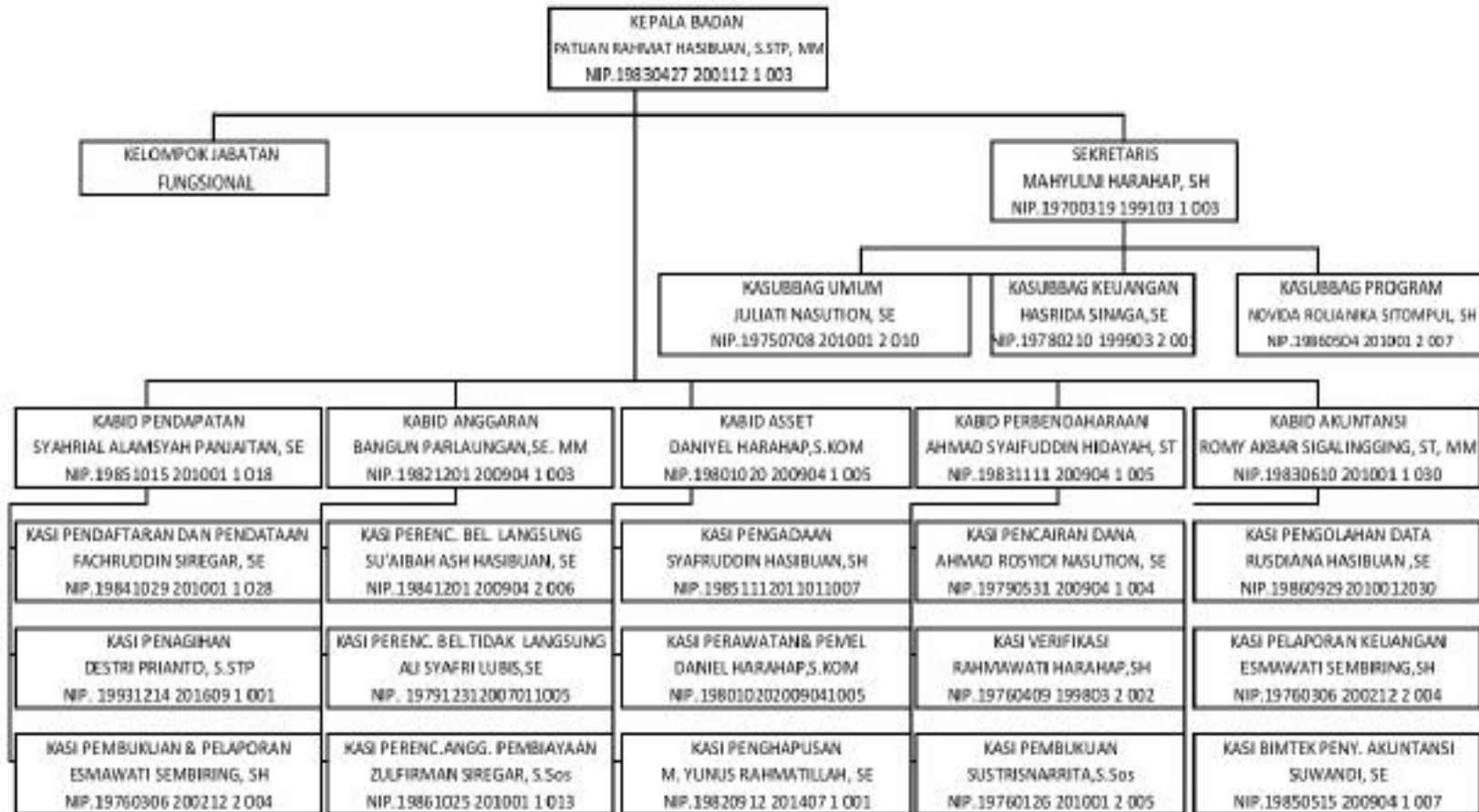
- 4) Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Bapak Mahyulni Harahap, SE mengatakan :

“Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah yang transparan. Pemenuhan kebutuhan publik ini dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.”⁴

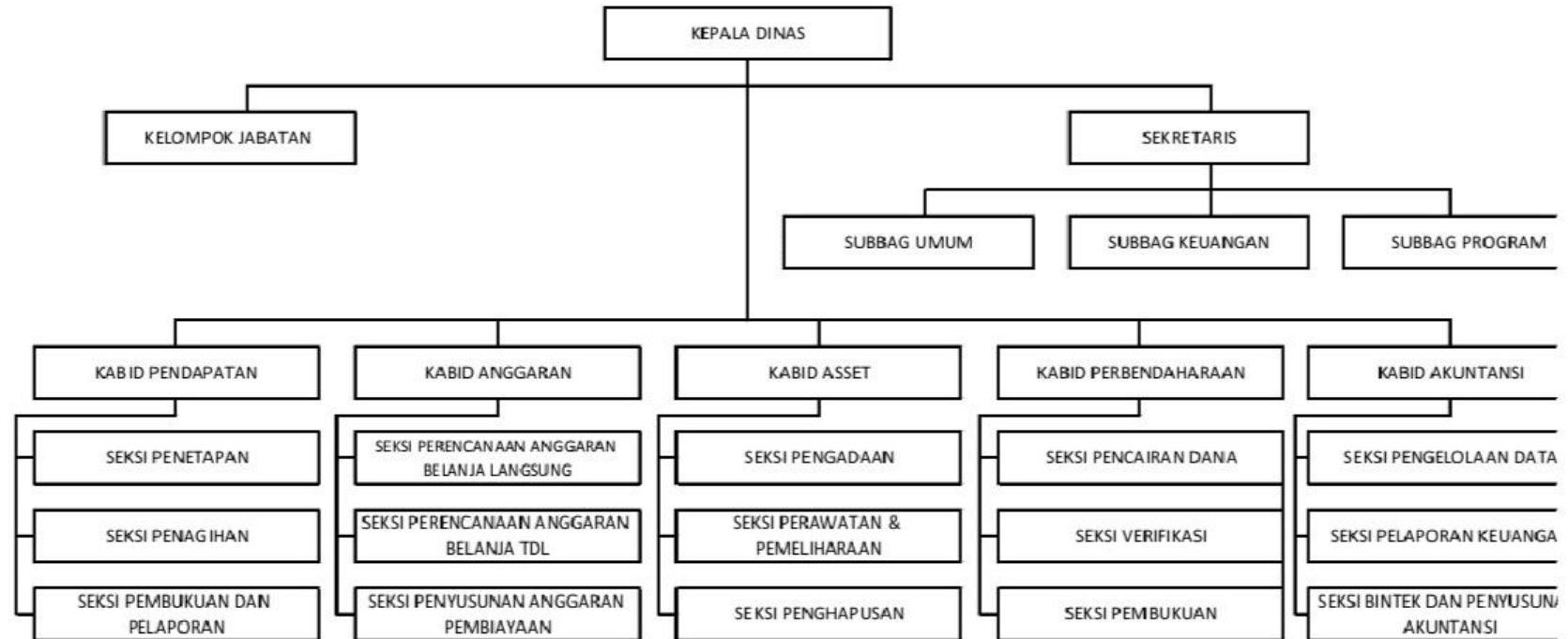
⁴ Hasil wawancara di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 2 maret 2021.

c. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 08 TAHUN 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara

B. Hasil Penelitian

Analisis Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKPD Padang Lawas Utara dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Periode 2015-2019

Tahun Anggaan	PAD (RP)	TPD (RP)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2015	26.446.077.260,00	748.309.624.709,00	3,53	Sangat Kurang
2016	30.453.223.133,00	1.049.569.061.025,00	2,90	Sangat Kurang
2017	74.664.741.692,00	1.113.718.707.253,00	6,70	Sangat Kurang
2018	74.306.097.499,00	1.063.266.609.624,00	6,98	Sangat

2019	42.929.111.657,00	1.198.289.989.290,00	3,58	Kurang Sangat Kurang
------	-------------------	----------------------	------	----------------------------

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2015 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 26.446.077.260,00 atau sebesar 3,53% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 30.453.223.133,00 atau sebesar 2,90% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 74.664.741.692,00 atau sebesar 6,70% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar Rp 74.306.097.499,00 atau sebesar 6,98% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 42.929.111.657,00 atau sebesar 3,58% dari total pendapatan. Jika dilihat dari hasil Rasio Desentralisasi Fiskal selurunya dapat dikatakan kemampuan Keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara masih sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

**Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Periode 2015-2019**

Tahun Anggaran	PAD (RP)	Pendapatan Transfer (RP)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2015	26.446.077.260,00	504.651.158.603,00	5,24	Instruktif
2016	30.453.223.133,00	794.269.689.546,00	3,38	Instruktif

2017	74.664.741.692,00	709.333.080.176,00	10,5	Instruktif
2018	74.306.097.499,00	700.703.635.068,00	10,6	Instruktif
2019	42.929.111.657,00	763.032.737.308,00	5,62	Instruktif

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kemampuan keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara sangat rendah dan pola hubungannya adalah pola instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Dimulai pada tahun 2015 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 26.446.077.260,00 atau sebesar 5,24% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 30.453.223.133,00 atau sebesar 3,38% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 74.664.741.692,00 atau sebesar 10,5% dari total pendapatan. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar Rp 74.306.097.499,00 atau sebesar 10,6% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 42.929.111.657,00 atau sebesar 5,62% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Periode 2015-2019

Tahun	Anggaran PAD (RP)	Realisasi PAD (RP)	REPAD (%)	Kriteria
2015	26.315.846.201,00	26.446.077.260,00	100,50	Efektif
2016	33.884.459.003,00	30.453.223.133,00	89,88	Tidak Efektif
2017	75.041.209.295,00	74.664.741.692,00	99,50	Tidak Efektif
2018	92.265.810.879,00	74.306.097.499,00	80,53	Tidak Efektif
2019	48.826.658.886,00	42.929.111.657,00	88,00	Tidak Efektif

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun rata-rata sebesar 91.69%, dimulai dari tahun 2015 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 100,50%, untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 89,88%, 99,50% , 80,53%, dan 88,00%.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

**Tabel 4.4 Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Periode 2015-2019**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	REKD (%)	Kriteria
2015	700.724.949.085,00	733.242.618.371,00	95,57	Kurang Efisien
2016	761.974.221.809,00	1.049.569.061.025,00	72,60	Efisien
2017	1.185.740.899.249,00	1.113.718.707.253,00	104,27	Tidak Efisien
2018	1.081.855.421.645,00	1.063.266.609.624,00	101,75	Tidak Efisien
2019	1.190.735.750.560,00	1.198.289.989.290,00	99,37	Kurang Efisien

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Data Diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 di atas Efisiensi Keuangan Daerah BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2015 tergolong kurang efisien karena interval efisiensinya diantara 90%-100%. Hal ini terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Tahun 2016 tergolong efisien karena dilihat dari intervalnya diantara 60%-80%. Tahun 2017 dan 2018 tergolong tidak efisiensi karena nilai rasionya sudah diatas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Dan pada tahun 2019 efisiensinya tergolong kurang efisien yaitu sebesar 99,37%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

5) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

**Tabel 4.5 Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Periode 2015-2019
(Belanja Operasi)**

Tahun Anggaran	Total Belanja Daerah (RP)	Total Belanja Operasi (RP)	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	700.724.949.085,00	733.242.618.371,00	104,64
2016	761.974.221.809,00	1.049.569.061.025,00	137,74
2017	1.185.740.899.249,00	1.113.718.707.253,00	93,92
2018	1.081.855.421.645,00	1.063.266.609.624,00	98,28
2019	1.190.735.750.560,00	1.198.289.989.290,00	100,63

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 diatas diketahui bahwa Rasio Belanja Keserasian Operasi BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan rata-rata sebesar 107.04%, dimulai pada tahun 2015 dimana rasio nya sebesar 104,64% meningkat ada tahun 2016 menjadi 137,74%, dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yaitu 93,92% dan 98,28%. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 100,63.

**Tabel 4.6 Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Periode 2015-2019
(Belanja Modal)**

Tahun Anggaan	Total Belanja Daerah (RP)	Belanja Modal (RP)	Rasio Belanja Modal (%)
2015	700.724.949.085,00	170.639.985.692,00	24,35
2016	761.974.221.809,00	228.440.427.691,00	29,98
2017	1.185.740.899.249,00	312.571.172.200,00	26,36
2018	1.081.855.421.645,00	196.036.175.259,00	18,12
2019	1.190.735.750.560,00	247.484.629.027,00	20,78

Sumber : BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara yang rata-rata sebesar 23.91% dimulai pada tahun 2015 dimana rasionya sebesar 24,35%. Mengalami kenaikan 29,98% pada tahun 2016. Dan mengalami kenaikan lagi sebesar 26,36% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,12% dan terakhir pada tahun 2019 sebesar 20,78%.

C. Pembahasan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut uraian dari perhitungan table 4.1 dapat dilihat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih sangat kurang karena masih berada dalam skala interval 0,00% - 10,00% dan ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Padang Lawas Utara masih relative kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi yang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andal besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setempat. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan untuk berupaya meningkat PAD yang dengan menyebarkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru. Menurut uraian dan perhitungan ini dapat

disimpulkan bahwa Rasio Desentralisasi Fiskal selama lima tahun Kabupaten Padang Lawas Utara masih Sangat Kurang.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut uraian dari perhitungan table 4.2 dapat di disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tergolong masih sangat rendah mengalami penurunan dan kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki rata-rata kemandirian keuangannya masih tergolong rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan inruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sagat dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari bantuan pusat. Jadi Kemandirian Keuangan kabupaten Padang Lawas Utara secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rensah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

3. Rasio Efektivitas PAD

Menurut uraian dari perhitungan table 4.3 dapat di disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa Anggaran PAD Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2015-2019 berjalan tidak efektif, diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2015 sebesar 100,50%, tahun 2016 sebesar 89,88%, tahun 2017 sebesar 99,50%,

tahun 2018 sebesar 80,53%, dan tahun 2019 adalah sebesar 88,00%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 berjalan Tidak Efektif karena Efektivitasnya masih dibawah 100%. Untuk tahun 2015 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut uraian dari perhitungan table 4.4 dapat di disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berjalan kurang efisien, berdasarkan perhitungan diketahui rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 90%-100% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih tergolong besar jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah. Meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menekankan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan jumlah belanja daerah, sehingga dapat dikatakan Kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah daerahnya. Sedangkan pada tahun 2016 efisiensi keuangan daerahnya sudah tergolong efisien dikarenakan jumlah yang telah diminimalisir dan jumlah pendapatan yang didapat cukup tinggi sehingga efisiensi belanja daerah dapat tercapai.

5. Rasio Keserasian

Menurut uraian dari perhitungan table 4.4 dan 4.5 dapat di disimpulkan bahwa Rasio Keserasian selama lima tahun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berjalan kurang efisien, menurut perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih di prioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini karena belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tergolong kecil atau belum terpenuhi.

BAB V

KESIMPULAN DAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dikategorikan sangat kurang dengan rata-ratanya sebesar 4,74%, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang rasionya masing-masing adalah 2015 sebesar 3,53%; 2016 sebesar 2,90%; 2017 sebesar 6,70%; 2018 sebesar 6,98%; dan 2019 sebesar 3,58%.
2. Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya masih tergolong dalam interval 0%-25% dengan rata-rata sebesar 7,07%. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang rasionya 2015 sebesar 5,24%; 2016 sebesar 3,38%; 2017 sebesar 10,5%; 2018 sebesar 10,6%; dan 2019 sebesar 5,62%.
3. Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2016 sampai 2019 berjalan tidak efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu di tahun 2016 sebesar 89,88%; 2017 sebesar 99,53%; tahun 2018 sebesar 80,53%; 2019 sebesar 88,00%. Sedangkan pada tahun 2015 sudah efektif karena nilai yang diperoleh lebih dari 100% yaitu sebesar 100,50% dengan rata-rata sebesar 91,69%.
4. Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari segi Rasio efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2015 sampai 2019 berjalan kurang efisien, diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu rata-rata 94,74%. Berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan rasio masing-masing pada tahun 2015 sebesar 95,57%; 2016 sebesar 72,60%; 2017 104,27%; 101,75%; dan 99,37%.

5. Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari Rasio Keserasian pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan rata-rata belanja modal sebesar 24% yang masing-masing rasionya 2015 sebesar 104,64%; 2016 sebesar 137,74%; 2017 sebesar 93,92%; 2018 sebesar 98,28%; dan 2019 sebesar 100,63%. Rasio keserasian Pemerintah Daerah memfokuskan pada belanja operasi yang artinya belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.

B. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis guna mendukung kemajuan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dengan meningkatkan belanja modal dan harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber pendapatannya yang telah ada.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD-nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan hasil analisis rasio yang telah penulis paparkan maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah serta mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian di Kabupaten atau menambah Kabupaten di Sumatera Utara dan menambah periode waktu penelitian serta menambahkan jenis-jenis rasio keuangan yang lebih banyak sehingga penelitiannya lebih andal dan akurat dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini hanya dilakukan di salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, maka peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakr, Muhammad Abd al-Rahman. *Al-Sultah al-Qadla''iyah wa al-Syakhsiyah al-Qadli*, Kairo: al-Zuhkra' li A'lam al-Arabi. 1998.
- Arifandi, Muhammad. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang*, Uinsu, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018
- Arthaingan, Muthia. "Pengaruh Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Pada Kota Bogor Jawa Barat". 2014.
- Didin, Hafidhuddin.,Hendra Tanjung. *Manajeme Syarah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Dora, Detisa. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Khusus Pada Pemerintah Nanggroe aceh Darussalam*, Skripsi. 2010.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UMP AMP YKN. 2001.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Empat, Jakarta: Selemba Empat. 2007.
- _____. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jogjakarta: Selemba Empat. 2012.
- Harahap, Isnaini, Marliyah., *Islam dan Isu keuangan Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2015.
- Harahap, Sunaji. *Pengantar Manajemen: Pendekatan Integrasi Konsep Syariah* Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Hermain, Hendra., Nurlaila., Safrida., Lili., Sufitrayanti., Alfurkaniati., Yana., Ikhsan., Arpan., Olivia., Hastuti., Jubi dan Nurwani., *Pengantar Akuntansi I*. Medan: Madenatera. 2019.
- Hermain,Hendra., Aqwa Naser.,Debby Tamara. *Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Daerah*. Medan: Febi Uinsu Press. 2020.
- Ikhsan, Arpan. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media. 2014.

- Istyaningtias, Dian. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014*, Skripsi pada IAIN Surakarta. 2017.
- Julian Pilat, Juddy. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015*, *Jurnal Accountability, Universitas Sam Ratulangi*. 2017.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press. 2001.
- Moleong Riduwan J. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi. 2002.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi. 2002.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Muchammad Faishal. *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Skripsi. 2018.
- Nurdiwaty, Diah. *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri*, *Jurnal Ekonomika Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang*. 2016.
- P3EI. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.
- Putri, Ika Nurhayati. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Banten*, Banten, Uin Sultan Maulana Hasanuddin. 2018.
- Putro, Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Emzar. *Penelitian Kualitatif: Analisis Data Jakarta*: Rajawali Pers. 2014.\
- Radjab, Enny. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017.

- Raja Assuriyani. “*Anlisis Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal*”.*Jurnal*. Universitas Sumatera Utara. 2015.
- Renyowijoyo, Muindo. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Penelitian Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2004.
- R Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo. 2010.
- Rosadi, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dilengkapi Undang-undang Nomor 32.*, Bandung : Pustaka Setia. 2010.
- Rosmiaty termizi. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 2014.
- Sihombing, Yonge. *Manajemen APBD*. Medan: Bina Media Perintis. 2007.
- Sitompul, Syahman., Nurlaila Harhap., Hendra Hermain. *Akuntansi Mesjid*, Medan, Febi Uinsu Press. 2015.
- Sri, Widada. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Klaten, Skripsi. Fakultas ekonomi dan Bisni*. 2012.
- Sumarjo. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta. 2007.
- Syafina Laylan, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, Medan : Febi. 2018.
- Syamsi, Ibnu. *Pokok-pokok Kebijakan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional*, Edisi Pertama, Jakarta, Rajawali. 1986.
- Ugi, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ).
- Tahrir, Hizbu. *Ajhizah Daulah*, Beirut. 2005.

Tila Soraya. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Membiayai Pemerintah Kabupaten batu Bara*, Uinsu, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

Wenny Alvionita. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros", Fakultas Ekonomi Universitas Bosawa. 2018.

Widodo. *Good gevernance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era sesentralisasi dan otonomi daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia. 2001.

www.pemkabpaluta.com

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Zaman, Badruz. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kenerja Keuangan Daerah Di Kota Kediri*, Jurnal Ekonomika-Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang. 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

KODE REKUNING	URAIAN ANGGARAN		s/d PERIODE LALU	REALISASI	
					PERIODE INI
4	PENDAPATAN	748.309.624.709,00	0,00	733.242.018.371,84	733.242.018.371,84
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.315.846.201,00	0,00	26.446.077.260,84	26.446.077.260,84
4 . 1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.595.084.435,00	0,00	4.693.774.307,00	4.693.774.307,00
4 . 1.1.01	Pajak Hotel	57.960.000,00	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00
4 . 1.1.01.09	Hotel Melati Satu	57.960.000,00	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00
4 . 1.1.02	Pajak Restoran	939.024.000,00	0,00	629.643.423,00	629.643.423,00
4 . 1.1.02.01	Restoran	939.024.000,00	0,00	629.643.423,00	629.643.423,00
4 . 1.1.03	Pajak Hiburan	1.650.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4 . 1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4 . 1.1.03.21	Tontonan Keramaian di Kecamatan	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.1.04	Pajak Reklame	86.036.911,00	0,00	50.306.329,00	50.306.329,00
4 . 1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	43.738.931,00	0,00	50.306.329,00	50.306.329,00
4 . 1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.1.04.05	Reklame Berjalan	817.980,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.1.04.11	Reklame Seng	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.1.04.12	Reklame Spanduk/Umbul-Umbul	16.330.000,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.129.205.000,00	0,00	2.532.285.463,00	2.532.285.463,00
4 . 1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.129.205.000,00	0,00	2.532.285.463,00	2.532.285.463,00
4 . 1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	890.000.000,00	0,00	702.935.116,00	702.935.116,00
4 . 1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	300.000.000,00	0,00	247.483.000,00	247.483.000,00
4 . 1.1.06.08	Pasir	425.000.000,00	0,00	298.232.116,00	298.232.116,00

4 .1.1.06.09	TanahTimbun	7.500.000,00	0,00	3.594.000,00	3.594.000,
4 .1.1.06.10	BatuPecah/Kerikil	150.000.000,00	0,00	153.626.000,00	153.626.000,
4 .1.1.06.33	TanahLiat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4 .1.1.08	PajakAirBawah Tanah	11.632.000,00	0,00	0,00	0,00
4 .1.1.08.01	PajakAirBawah Tanah	11.632.000,00	0,00	0,00	0,00
4 .1.1.11	PajakBumi danBangunan (PBB)	1.279.576.524,00	0,00	628.788.976,00	628.788.976,
4 .1.1.11.01	PBB SektorPerkotaan	265.176.559,00	0,00	0,00	0,00
4 .1.1.11.02	PBB SektorPerdesaan	1.014.399.965,00	0,00	628.788.976,00	628.788.976,
4 .1.1.12	PajakBeaPerolehan Hak atasTanah danBangunan (BPHTB)	200.000.000,00	0,00	133.965.000,00	133.965.000,
4 .1.1.12.01	BPHTB- Pemindahan Hak	200.000.000,00	0,00	111.494.500,00	111.494.500,

4 .1.1.12.02	BPHTB- Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	22.470.500,00	22.470.500,00
4 .1.2	HasilRetribusi Daerah	17.576.342.000,00	0,00	5.566.728.436,00	5.566.728.436,00
4 .1.2.01	RetribusiJasa Umum	16.122.179.000,00	0,00	4.840.838.715,00	4.840.838.715,00
4 .1.2.01.01	RetribusiPelayanan Kesehatan - Puskesmas	9.219.365.000,00	0,00	146.488.300,00	146.488.300,00
4 .1.2.01.05	RetribusiPelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	5.657.000.000,00	0,00	3.974.545.915,00	3.974.545.915,00
4 .1.2.01.07	RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan	125.548.000,00	0,00	23.708.500,00	23.708.500,00
4 .1.2.01.19	RetribusiPelayanan ParkirDi Tepi Jalan Umum	376.440.000,00	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00
4 .1.2.01.20	RetribusiPelayanan Pasar - Pelataran	226.314.000,00	0,00	165.753.000,00	165.753.000,00
4 .1.2.01.21	RetribusiPelayanan Pasar - Los	118.984.000,00	0,00	31.995.000,00	31.995.000,00
4 .1.2.01.22	RetribusiPelayanan Pasar - Kios	77.976.000,00	0,00	52.334.500,00	52.334.500,00
4 .1.2.01.25	RetribusiPKB - Mobil Penumpang - Minibus	36.000.000,00	0,00	9.810.500,00	9.810.500,00
4 .1.2.01.44	RetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasi	280.360.000,00	0,00	410.703.000,00	410.703.000,00
4 .1.2.01.45	RetribusiPelayanan Pasar - MCK	4.192.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
4 .1.2.02	RetribusiJasa Usaha	682.087.000,00	0,00	423.150.574,00	423.150.574,00
4 .1.2.02.04	RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	431.625.000,00	0,00	300.425.000,00	300.425.000,00
4 .1.2.02.05	RetribusiPasar Grosir/Pertokoan	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4 .1.2.02.09	RetribusiTempat pelelangan Ternak	9.000.000,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00
4 .1.2.02.15	RetribusiTerminal - FasilitasLainnya di Lingkungan Terminal	24.600.000,00	0,00	9.188.000,00	9.188.000,00
4 .1.2.02.17	RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	15.000.000,00	0,00	10.680.000,00	10.680.000,00
4 .1.2.02.21	RetribusiTempat Rekreasi	8.000.000,00	0,00	8.896.000,00	8.896.000,00
4 .1.2.02.26	RetribusiPenjualan Produksi UsahaDaerah	14.250.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4 .1.2.02.29	RetribusiPengolahan Limbah CairIndustri	88.584.000,00	0,00	60.560.574,00	60.560.574,00
4 .1.2.02.31	RetribusiRumah PotongHewan	3.518.000,00	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00
4 .1.2.02.32	RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah - Alat- AlatPertanian	87.510.000,00	0,00	14.135.000,00	14.135.000,00
4 .1.2.03	RetribusiPerizinan Tertentu	772.076.000,00	0,00	302.739.147,00	302.739.147,00
4 .1.2.03.01	RetribusiIzin Mendirikan Bangunan	672.000.000,00	0,00	217.971.337,00	217.971.337,00
4 .1.2.03.03	RetribusiIzin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada OrangPribadi	0,00	0,00	76.267.810,00	76.267.810,00
4 .1.2.03.04	RetribusiIzin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	98.576.000,00	0,00	0,00	0,00
4 .1.2.03.06	RetribusiPemberian Izin Trayek kepada Badan	1.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
4 .1.3	HasilPengelolaanKekayaanDaerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	479.588.562,00	479.588.562,00
4 .1.3.01	BagianLabaatasPenyertaan Modal padaPerusahaan MilikDaerah/BUMD	0,00	0,00	479.588.562,00	479.588.562,00
4 .1.3.01.02	BagianLabaatasPenyertaan Modal padaBUMD	0,00	0,00	479.588.562,00	479.588.562,00

4 .1.4.06	PendapatanDenda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	533.682.650,00	533.682.650,
4 .1.4.06.01	Bidang Pendidikan	0,00	0,00	91.466.500,00	91.466.500,
4 .1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	442.216.150,00	442.216.150,
4 .1.4.10	PendapatanDari Pengembalian	0,00	0,00	1.313.450.719,34	1.313.450.719,
4 .1.4.10.03	PendapatanDari Pengembalian Kelebihan Pembayaran GajidanTunjangan	0,00	0,00	67.033.719,34	67.033.719,34
4 .1.4.10.04	PendapatanDari Pengembalian Kelebihan Pembayaran PerjalananDinas	0,00	0,00	1.246.417.000,00	1.246.417.000,00
4 .1.4.18	Lain-lainPAD yangSah Lainnya	0,00	0,00	1.481.376.468,50	1.481.376.468,
4 .1.4.18.01	Lain-lainPAD yangSah Lainnya	0,00	0,00	1.481.376.468,50	1.481.376.468,
4 .1.4.22	PendapatanDanaKapitasi JKN	208.300.000,00	0,00	6.555.560.500,00	6.555.560.500,
4 .1.4.22.01	PendapatanDanaKapitasi JKN	208.300.000,00	0,00	6.555.560.500,00	6.555.560.500,
4 .2	DANAPERIMBANGAN	511.514.274.000,00	0,00	504.651.158.603,00	504.651.158.603,
4 .2.1	BagiHasilPajak/BagiHasilBukanPajak	21.051.442.000,00	0,00	14.188.326.603,00	14.188.326.603,
4 .2.1.01	BagiHasil Pajak	18.436.011.000,00	0,00	12.509.311.390,00	12.509.311.390,
4 .2.1.01.01	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPertambangan	8.234.239.000,00	0,00	4.487.315.750,00	4.487.315.750,
4 .2.1.01.03	BagiHasil dari Pajak Penghasilan OrangPribadi	5.464.942.000,00	0,00	3.074.962.140,00	3.074.962.140,
4 .2.1.01.04	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPerkebunan	791.051.000,00	0,00	791.051.000,00	791.051.000,
4 .2.1.01.05	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPerhutanan	142.942.000,00	0,00	142.942.000,00	142.942.000,
4 .2.1.01.06	BagiHasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	291.688.000,00	291.688.000,
4 .2.1.01.07	Biaya Pemungutan PBB	374.289.000,00	0,00	292.804.500,00	292.804.500,
4 .2.1.01.08	BagiHasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	3.428.548.000,00	0,00	3.428.548.000,00	3.428.548.000,
4 .2.1.02	BagiHasil Bukan Pajak/SumberDayaAlam	2.615.431.000,00	0,00	1.679.015.213,00	1.679.015.213,
4 .2.1.02.02	BagiHasil Dari Provisi SumberDayaHutan	769.688.000,00	0,00	448.151.742,00	448.151.742,
4 .2.1.02.05	BagiHasil Dari Iuran Eksplorasi danIuran Eksploitasi (Royalti)	312.236.000,00	0,00	0,00	0,00
4 .2.1.02.07	BagiHasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	915.093.000,00	0,00	703.264.033,00	703.264.033,
4 .2.1.02.08	BagiHasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	77.370.000,00	0,00	54.159.000,00	54.159.000,
4 .2.1.02.09	BagiHasil Dari Pertambangan Gas Bumi	115.700.000,00	0,00	80.990.000,00	80.990.000,
4 .2.1.02.10	BagiHasil Dari Pertambangan PanasBumi	14.970.000,00	0,00	10.479.000,00	10.479.000,

4 .2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	410.374.000,00	0,00	381.971.438,00	381.971.438,00
4 .2.2	Dana Alokasi Umum	444.806.362.000,00	0,00	444.806.362.000,00	444.806.362.000,00
4 .2.2.01	Dana Alokasi Umum	444.806.362.000,00	0,00	444.806.362.000,00	444.806.362.000,00
4 .2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	444.806.362.000,00	0,00	444.806.362.000,00	444.806.362.000,00
4 .2.3	Dana Alokasi Khusus	45.656.470.000,00	0,00	45.656.470.000,00	45.656.470.000,00
4 .2.3.01	Dana Alokasi Khusus(DAK)	45.656.470.000,00	0,00	45.656.470.000,00	45.656.470.000,00
4 .2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	14.314.560.000,00	0,00	14.314.560.000,00	14.314.560.000,00
5 .1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah	115.739.604.764,00	0,00	94.167.288.994,00	94.167.288.994,00
5 .1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	114.947.513.000,00	0,00	93.441.099.661,00	93.441.099.661,00
5 .1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.....	114.947.513.000,00	0,00	93.441.099.661,00	93.441.099.661,00
5 .1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	792.091.764,00	0,00	726.189.333,00	726.189.333,00
5 .1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	792.091.764,00	0,00	726.189.333,00	726.189.333,00
5 .1.8	Belanja Tidak Terduga	2.691.818.637,00	0,00	705.490.250,00	705.490.250,00
5 .1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.691.818.637,00	0,00	705.490.250,00	705.490.250,00
5 .1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.691.818.637,00	0,00	705.490.250,00	705.490.250,00
5 .2	BELANJALANGSUNG	362.498.795.052,00	0,00	320.030.742.403,00	320.030.742.403,00
5 .2.1	Belanja Pegawai	32.897.195.000,00	0,00	31.494.932.600,00	31.494.932.600,00
5 .2.1.01	Honorarium PNS	13.010.404.000,00	0,00	11.969.558.000,00	11.969.558.000,00
5 .2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.492.054.000,00	0,00	10.519.676.500,00	10.519.676.500,00
5 .2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	431.330.000,00	0,00	412.439.500,00	412.439.500,00
5 .2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang Jasa	257.510.000,00	0,00	250.652.000,00	250.652.000,00
5 .2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	829.510.000,00	0,00	786.790.000,00	786.790.000,00
5 .2.1.02	Honorarium Non PNS	18.896.490.000,00	0,00	18.689.996.600,00	18.689.996.600,00
5 .2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	18.701.430.000,00	0,00	18.526.586.600,00	18.526.586.600,00
5 .2.1.02.02	Upah Buruh/Karyawan	195.060.000,00	0,00	163.410.000,00	163.410.000,00
5 .2.1.03	Uang Lembur	979.501.000,00	0,00	824.578.000,00	824.578.000,00
5 .2.1.03.01	Uang Lembur PNS	979.501.000,00	0,00	824.578.000,00	824.578.000,00
5 .2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00

5 .2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.479.535.696,00	0,00	3.093.678.867,00	3.093.678.867,00
5 .2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.680.025,00	0,00	58.680.025,00	58.680.025,00
5 .2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.663.696.286,00	0,00	1.657.898.816,00	1.657.898.816,00
5 .2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	355.390.000,00	0,00	349.750.000,00	349.750.000,00
5 .2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	474.921.700,00	0,00	194.010.534,00	194.010.534,00
5 .2.2.02.05	Belanja Bahan Kimiadan Pupuk	47.839.400,00	0,00	47.839.400,00	47.839.400,00
5 .2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	30.000.000,00	0,00	29.250.000,00	29.250.000,00
5 .2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek	462.462.792,00	0,00	448.349.292,00	448.349.292,00
5 .2.2.02.08	Belanja Komponen Peralatan danPerlengkapan Kantor	114.900.000,00	0,00	98.330.800,00	98.330.800,00
5 .2.2.02.09	Belanja Pakan Ternak	83.570.600,00	0,00	82.454.000,00	82.454.000,00
5 .2.2.02.10	Upahtukang	15.816.000,00	0,00	15.816.000,00	15.816.000,00
5 .2.2.02.11	Belanja Bahan Pameran	112.258.893,00	0,00	111.300.000,00	111.300.000,00
5 .2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.943.094.077,00	0,00	15.821.652.270,00	15.821.652.270,00
5 .2.2.03.01	Belanja Telepon	293.800.000,00	0,00	124.690.400,00	124.690.400,00
5 .2.2.03.02	Belanja Air	37.400.000,00	0,00	14.728.680,00	14.728.680,00
5 .2.2.03.03	Belanja Listrik	3.100.962.477,00	0,00	2.415.056.975,00	2.415.056.975,00
5 .2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	619.300.000,00	0,00	577.227.500,00	577.227.500,00
5 .2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TVSatelit	629.576.000,00	0,00	542.412.692,00	542.412.692,00
5 .2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	31.050.000,00	0,00	29.125.000,00	29.125.000,00
5 .2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	391.383.240,00	0,00	255.405.600,00	255.405.600,00
5 .2.2.03.12	Belanja Jasa Pemberitaan	72.950.000,00	0,00	46.950.000,00	46.950.000,00
5 .2.2.03.13	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	215.400.000,00	0,00	204.145.000,00	204.145.000,00
5 .2.2.03.14	Belanja jasa pelayanan kesehatan	14.288.722.360,00	0,00	11.398.655.123,00	11.398.655.123,00
5 .2.2.03.16	Belanja jasa penyusunan danpembuatan buku/laporan	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00
5 .2.2.03.17	Belanja Administrasi Proyek	198.000.000,00	0,00	148.705.300,00	148.705.300,00
5 .2.2.03.18	Belanja Jasa TenagaKontrak/Outsourcing	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00
5 .2.2.03.19	Belanja Jasa TenagaKebersihan	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00
5 .2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.314.851.653,00	0,00	5.910.163.094,00	5.910.163.094,00
5 .2.2.05.01	Belanja JasaService	5.599.810.728,00	0,00	5.264.331.213,00	5.264.331.213,00
5 .2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	155.398.425,00	0,00	149.747.401,00	149.747.401,00
5 .2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/GasDan Pelumas	448.422.500,00	0,00	428.859.700,00	428.859.700,00
5 .2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	0,00	14.541.000,00	14.541.000,00
5 .2.2.05.07	Belanja Surat Tanda NomorKendaraan	78.220.000,00	0,00	52.683.780,00	52.683.780,00
5 .2.2.06	Belanja Cetak danPenggandaan	6.400.884.242,00	0,00	5.893.192.423,00	5.893.192.423,00

5 .2.2.07.01	Belanja SewaRumah Jabatan/Rumah Dinas	396.000.000,00	0,00	396.000.000,00	396.000.000,
5 .2.2.07.02	Belanja SewaGedung/Kantor/Tempat	1.200.172.498,00	0,00	1.144.091.833,00	1.144.091.833,
5 .2.2.07.03	Belanja SewaRuangRapat/Pertemuan	341.990.000,00	0,00	336.370.000,00	336.370.000,
5 .2.2.07.05	Belanja sewatempat penginapan/mess	350.700.000,00	0,00	289.460.000,00	289.460.000,
5 .2.2.08	Belanja SewaSaranaMobilitas	124.849.999,00	0,00	122.800.000,00	122.800.000,
5 .2.2.08.01	Belanja SewaSaranaMobilitasDarat	124.849.999,00	0,00	122.800.000,00	122.800.000,
5 .2.2.10	Belanja SewaPerlengkapan danPeralatan Kantor	1.163.751.539,00	0,00	999.601.539,00	999.601.539,
5 .2.2.10.01	Belanja Sewa MejaKursi	146.651.539,00	0,00	65.401.539,00	65.401.539,
5 .2.2.10.03	Belanja SewaProyektor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,
5 .2.2.10.04	Belanja SewaGenerator	55.100.000,00	0,00	55.100.000,00	55.100.000,
5 .2.2.10.05	Belanja SewaTenda	470.050.000,00	0,00	410.250.000,00	410.250.000,
5 .2.2.10.06	Belanja SewaPakaian Adat/Tradisional	27.250.000,00	0,00	27.250.000,00	27.250.000,
5 .2.2.10.07	Belanja sewasoundsystem	274.700.000,00	0,00	251.600.000,00	251.600.000,
5 .2.2.10.09	Belanja sewahiburan	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,
5 .2.2.10.11	Belanja SewaPeralatan Tenun	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,
5 .2.2.11	Belanja Makanan danMinuman	9.507.919.400,00	0,00	8.588.975.000,00	8.588.975.000,
5 .2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	692.609.000,00	0,00	662.073.000,00	662.073.000,
5 .2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.477.616.400,00	0,00	5.699.304.000,00	5.699.304.000,
5 .2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	967.664.000,00	0,00	909.806.000,00	909.806.000,
5 .2.2.11.04	Belanja makanan danminuman pelatihan	677.030.000,00	0,00	647.442.000,00	647.442.000,
5 .2.2.11.05	Belanja Makanan danMinuman Pasien	315.000.000,00	0,00	292.350.000,00	292.350.000,
5 .2.2.11.06	Belanja Makan danMinum Rumah Tangga KDH danWKDH	378.000.000,00	0,00	378.000.000,00	378.000.000,
5 .2.2.12	Belanja Pakaian Dinasdan Atributnya	1.495.677.835,00	0,00	1.460.429.250,00	1.460.429.250,
5 .2.2.12.01	Belanja Pakaian DinasKDH Dan WKDH	50.000.000,00	0,00	49.500.000,00	49.500.000,
5 .2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	105.000.000,00	0,00	103.620.000,00	103.620.000,
5 .2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.000.000,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,
5 .2.2.12.04	Belanja Pakaian DinasHarian (PDH)	912.937.850,00	0,00	880.739.250,00	880.739.250,
5 .2.2.12.06	Belanja Pakaian Khusus	346.989.985,00	0,00	346.970.000,00	346.970.000,
5 .2.2.12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	66.750.000,00	0,00	66.000.000,00	66.000.000,
5 .2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	461.964.575,00	0,00	452.448.000,00	452.448.000,
5 .2.2.13.01	Belanja Pakaian KerjaLapangan	336.964.575,00	0,00	328.448.000,00	328.448.000,
5 .2.2.13.03	Belanja pakaian pemadam kebakaran	125.000.000,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,
5 .2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.200.371.563,00	0,00	1.162.908.792,00	1.162.908.792,

5 .2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.224.530.298,00	0,00	23.832.135.966,00	23.832.135.966,
5 .2.2.15.01	Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah	6.701.135.827,00	0,00	5.927.961.700,00	5.927.961.700,
5 .2.2.15.02	Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah	20.523.394.471,00	0,00	17.904.174.266,00	17.904.174.266,
5 .2.2.16	Belanja BeasiswaPendidikan PNS	489.880.000,00	0,00	489.880.000,00	489.880.000,
5 .2.2.16.02	Belanja BeasiswaTugasBelajarS1	145.960.000,00	0,00	145.960.000,00	145.960.000,
5 .2.2.16.03	Belanja BeasiswaTugasBelajarS2	343.920.000,00	0,00	343.920.000,00	343.920.000,
5 .2.2.17	Belanja kursus,pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis PNS	2.956.754.565,00	0,00	2.399.193.058,00	2.399.193.058,
5 .2.2.17.01	Belanja Kursus-KursusSingkat/Pelatihan	1.404.179.815,00	0,00	1.348.229.958,00	1.348.229.958,
5 .2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	250.000.000,00	0,00	171.396.500,00	171.396.500,
5 .2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.302.574.750,00	0,00	879.566.600,00	879.566.600,
5 .2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	25.000.000,00	0,00	24.990.000,00	24.990.000,
5 .2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah TugasDalam Daerah	25.000.000,00	0,00	24.990.000,00	24.990.000,
5 .2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.060.634.518,00	0,00	13.245.639.250,00	13.245.639.250,
5 .2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.100.957.750,00	0,00	4.737.080.750,00	4.737.080.750,
5 .2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	2.222.000.000,00	0,00	2.143.545.500,00	2.143.545.500,
5 .2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	1.417.575.168,00	0,00	1.221.534.000,00	1.221.534.000,
5 .2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong	27.500.000,00	0,00	27.259.000,00	27.259.000,
5 .2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi/Bangunan Pelengkap	4.098.306.200,00	0,00	4.053.852.200,00	4.053.852.200,
5 .2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	508.928.000,00	0,00	449.043.900,00	449.043.900,
5 .2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	85.601.000,00	0,00	66.534.000,00	66.534.000,
5 .2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan AirMinum	20.000.000,00	0,00	19.978.500,00	19.978.500,
5 .2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	164.000.000,00	0,00	162.889.000,00	162.889.000,
5 .2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan RumahDinas/Jabatan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,
5 .2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Tanaman	325.766.400,00	0,00	323.922.400,00	323.922.400,
5 .2.2.21	Belanja JasaKonsultansi	3.915.535.000,00	0,00	3.528.032.500,00	3.528.032.500,
5 .2.2.21.01	Belanja JasaKonsultansi Penelitian	730.000.000,00	0,00	662.934.000,00	662.934.000,
5 .2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.761.100.000,00	0,00	2.475.423.500,00	2.475.423.500,
5 .2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	424.435.000,00	0,00	389.675.000,00	389.675.000,
5 .2.2.21.06	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	0,00	0,00	0,00	0,00

5 .2.2.27	Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber	4.368.740.000,00	0,00	4.056.150.000,00	4.056.150.000,
5 .2.2.27.01	Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber	4.368.740.000,00	0,00	4.056.150.000,00	4.056.150.000,
5 .2.2.28	Belanja Bantuan BeasiswaPendidikan	142.142.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.2.28.01	Belanja BeasiswaSD	49.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.2.28.02	Belanja BeasiswaSMP	49.980.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.2.28.03	Belanja BeasiswaSMA/SMK	42.482.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.2.29	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,
5 .2.2.29.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,
5 .2.3	BelanjaModal	195.992.287.903,00	0,00	170.639.985.692,00	170.639.985.692,
5 .2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan TempatKerja/Jasa	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.14	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-AlatBesarDarat	3.277.000.000,00	0,00	3.058.149.000,00	3.058.149.000,
5 .2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Loader	3.277.000.000,00	0,00	3.058.149.000,00	3.058.149.000,
5 .2.3.16	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	390.000.000,00	0,00	377.345.000,00	377.345.000,
5 .2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan ElectricGenerating Set	390.000.000,00	0,00	377.345.000,00	377.345.000,
5 .2.3.17	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatAngkutan DaratBermotor	8.764.080.726,00	0,00	7.933.667.375,00	7.933.667.375,
5 .2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Kendaraan DinasBermotor Perorangan	3.063.335.000,00	0,00	2.746.420.000,00	2.746.420.000,
5 .2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang	2.038.638.330,00	0,00	1.941.160.375,00	1.941.160.375,
5 .2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang	637.600.000,00	0,00	554.984.500,00	554.984.500,
5 .2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus	2.674.752.396,00	0,00	2.430.140.000,00	2.430.140.000,
5 .2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua	320.055.000,00	0,00	233.712.500,00	233.712.500,
5 .2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Tiga	29.700.000,00	0,00	27.250.000,00	27.250.000,
5 .2.3.24	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkur	107.455.505,00	0,00	92.685.000,00	92.685.000,
5 .2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkur	57.000.000,00	0,00	56.350.000,00	56.350.000,
5 .2.3.24.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Oscilloscope	24.748.750,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,
5 .2.3.24.07	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Universal Tester	2.500.000,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,

5 .2.3.25	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPengolahan	110.000.000,00	0,00	109.177.400,00	109.177.400,00
5 .2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPengolahanTanahdanTanaman	110.000.000,00	0,00	109.177.400,00	109.177.400,00
5 .2.3.26	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPemeliharaanTanaman/AlatPenyimpan	134.650.000,00	0,00	131.436.500,00	131.436.500,00
5 .2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPemeliharaanTanaman	34.650.000,00	0,00	34.611.500,00	34.611.500,00
5 .2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratorium	100.000.000,00	0,00	96.825.000,00	96.825.000,00
5 .2.3.27	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantor	978.632.926,00	0,00	865.762.750,00	865.762.750,00
5 .2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Mesin Ketik	25.905.960,00	0,00	24.835.000,00	24.835.000,00
5 .2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan MesinHitung/Jumlah	3.318.980,00	0,00	3.227.500,00	3.227.500,00
5 .2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatReproduksi(Pengganda)	105.000.000,00	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00
5 .2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPenyimpananPerlengkapanKantor	130.414.303,00	0,00	95.096.250,00	95.096.250,00
5 .2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantor	713.993.683,00	0,00	638.104.000,00	638.104.000,00
5 .2.3.28	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatRumah Tangga	2.023.841.274,00	0,00	1.779.923.592,00	1.779.923.592,00
5 .2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Meubelair	1.350.579.114,00	0,00	1.206.194.000,00	1.206.194.000,00
5 .2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPembersih	2.244.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5 .2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPendingin	169.726.789,00	0,00	130.348.000,00	130.348.000,00
5 .2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatDapur	65.372.016,00	0,00	59.341.592,00	59.341.592,00
5 .2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatRumahTanggaLainnya(Home Use)	397.069.355,00	0,00	355.940.000,00	355.940.000,00
5 .2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPemadamKebakaran	38.850.000,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00
5 .2.3.29	Belanja Modal Peralatan danMesin - PengadaanKomputer	2.366.452.098,00	0,00	2.220.654.200,00	2.220.654.200,00
5 .2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KomputerUnitJaringan	601.163.875,00	0,00	596.195.000,00	596.195.000,00
5 .2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Personal	1.324.809.695,00	0,00	1.204.354.200,00	1.204.354.200,00
5 .2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanKomputer Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan MiniKomputer	12.191.005,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00
5 .2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanPersonalKomputer	419.487.523,00	0,00	399.155.000,00	399.155.000,00
5 .2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00

5 .2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Kursi HadapDepanMejaKerjaPejabat	31.857.320,00	0,00	30.264.000,00	30.264.000,00
5 .2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Lemari danArsipPejabat	110.406.870,00	0,00	108.177.000,00	108.177.000,00
5 .2.3.31	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatStudio	289.594.071,00	0,00	295.900.000,00	295.900.000,00
5 .2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan StudioVisual	257.994.071,00	0,00	264.950.000,00	264.950.000,00
5 .2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan StudioVideodanFilm	25.000.000,00	0,00	24.350.000,00	24.350.000,00
5 .2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanPemetaanUkur	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
5 .2.3.32	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKomunikasi	41.200.000,00	0,00	32.490.000,00	32.490.000,00
5 .2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKomunikasiTelephone	39.200.000,00	0,00	32.490.000,00	32.490.000,00
5 .2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKomunikasiRadioSSB	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.33	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	1.426.473,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
5 .2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan AntenaSHF/Parabola	1.426.473,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
5 .2.3.34	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan AlatKedokteran	4.094.126.000,00	0,00	3.778.918.737,00	3.778.918.737,00
5 .2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKedokteranUmum	1.094.126.000,00	0,00	789.724.737,00	789.724.737,00
5 .2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-AlatKedokteranBedah	3.000.000.000,00	0,00	2.989.194.000,00	2.989.194.000,00
5 .2.3.35	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatan	1.138.148.078,00	0,00	784.894.752,00	784.894.752,00
5 .2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatanOlahraga	3.373.078,00	0,00	3.204.400,00	3.204.400,00
5 .2.3.35.07	Belanja Modal Pengadaan AlatKesehatan Lainnya	1.134.775.000,00	0,00	781.690.352,00	781.690.352,00
5 .2.3.36	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Unit-UnitLaboratorium	3.335.000.000,00	0,00	3.306.676.625,00	3.306.676.625,00
5 .2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumKimia	200.000.000,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00
5 .2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumFisika	300.000.000,00	0,00	297.000.000,00	297.000.000,00
5 .2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumPertanian	800.000.000,00	0,00	790.812.000,00	790.812.000,00
5 .2.3.36.47	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumPertanianA	1.100.000.000,00	0,00	1.097.000.000,00	1.097.000.000,00

5 .2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumLainnya	600.000.000,00	0,00	594.000.000,00	594.000.000,00
5 .2.3.37	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPeraga/PraktekSekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan BidangStudi :IPALanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.38	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Unit AlatLaboratoriumKimiaNuklir	11.100.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
5 .2.3.38.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Laboratory SafetyEquipment	11.100.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
5 .2.3.42	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumLingkunganHidup	5.720.000,00	0,00	5.710.500,00	5.710.500,00
5 .2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumPenunjang	5.720.000,00	0,00	5.710.500,00	5.710.500,00
5 .2.3.48	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan AlatKeamanan danPerlindungan	90.000.000,00	0,00	86.750.000,00	86.750.000,00
5 .2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan Alat BantuKemanan	90.000.000,00	0,00	86.750.000,00	86.750.000,00
5 .2.3.49	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja	58.157.619.510,00	0,00	54.489.967.960,00	54.489.967.960,00
5 .2.3.49.01	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Kantor	29.888.754.137,00	0,00	26.688.228.619,00	26.688.228.619,00
5 .2.3.49.02	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan	50.000.000,00	0,00	49.517.000,00	49.517.000,00
5 .2.3.49.06	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanKesehatan	3.591.743.657,00	0,00	3.302.879.150,00	3.302.879.150,00
5 .2.3.49.10	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Pendidikan	15.716.766.000,00	0,00	15.700.388.000,00	15.700.388.000,00
5 .2.3.49.12	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.280.955.716,00	0,00	6.223.022.191,00	6.223.022.191,00
5 .2.3.49.21	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	400.000.000,00	0,00	395.892.000,00	395.892.000,00
5 .2.3.49.27	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat KerjaLainnya	2.229.400.000,00	0,00	2.130.041.000,00	2.130.041.000,00
5 .2.3.53	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan TuguPeringatan	55.000.000,00	0,00	54.415.000,00	54.415.000,00
5 .2.3.53.02	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanTuguPembangunan	55.000.000,00	0,00	54.415.000,00	54.415.000,00
5 .2.3.57	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	661.940.000,00	0,00	647.125.550,00	647.125.550,00

5 .2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	70.779.509.550,00	0,00	61.539.572.300,00	61.539.572.300,00
5 .2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	70.779.509.550,00	0,00	61.539.572.300,00	61.539.572.300,00
5 .2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	11.720.898.195,00	0,00	8.502.216.925,00	8.502.216.925,00
5 .2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	10.369.587.345,00	0,00	7.167.345.925,00	7.167.345.925,00
5 .2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	1.351.310.850,00	0,00	1.334.871.000,00	1.334.871.000,00
5 .2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.254.590.115,00	0,00	5.188.588.470,00	5.188.588.470,00
5 .2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.547.486.365,00	0,00	1.538.810.970,00	1.538.810.970,00
5 .2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	0,00	99.212.000,00	99.212.000,00
5 .2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	3.607.103.750,00	0,00	3.550.565.500,00	3.550.565.500,00
5 .2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	5.149.000.000,00	0,00	4.844.845.200,00	4.844.845.200,00
5 .2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.149.000.000,00	0,00	4.844.845.200,00	4.844.845.200,00
5 .2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.583.779.990,00	0,00	1.568.281.606,00	1.568.281.606,00
5 .2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.583.779.990,00	0,00	1.568.281.606,00	1.568.281.606,00
5 .2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.805.480.000,00	0,00	2.770.988.000,00	2.770.988.000,00
5 .2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.219.000.000,00	0,00	1.197.948.000,00	1.197.948.000,00
5 .2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.586.480.000,00	0,00	1.573.040.000,00	1.573.040.000,00
5 .2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.540.301.000,00	0,00	2.591.236.000,00	2.591.236.000,00
5 .2.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	171.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.69.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal	8.000.000,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00
5 .2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.361.251.000,00	0,00	2.583.256.000,00	2.583.256.000,00

5 .2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	1.663.587.000,00	0,00	1.647.769.000,00	1.647.769.000,00
5 .2.3.78.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Rumah	1.663.587.000,00	0,00	1.647.769.000,00	1.647.769.000,00
5 .2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.902.813.693,00	0,00	1.218.903.750,00	1.218.903.750,00
5 .2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	1.845.813.693,00	0,00	1.161.903.750,00	1.161.903.750,00
5 .2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
5 .2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.810.129.407,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.810.129.407,00	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	25.344.000,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00
5 .2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	25.344.000,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00
5 .2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	408.680.328,00	0,00	406.498.000,00	406.498.000,00
5 .2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	193.160.000,00	0,00	192.198.000,00	192.198.000,00
5 .2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	215.520.328,00	0,00	214.300.000,00	214.300.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	-70.122.028.149,00	0,00	32.517.069.286,84	32.517.069.286,84
6 .1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.461.259.298,00	0,00	71.142.643.675,81	71.142.643.675,81
6 .1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.461.259.298,00	0,00	71.142.643.675,81	71.142.643.675,81
6 .1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.461.259.298,00	0,00	71.142.643.675,81	71.142.643.675,81
6 .1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.461.259.298,00	0,00	71.142.643.675,81	71.142.643.675,81
6 .2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	339.231.149,00	0,00	339.231.149,00	339.231.149,00
6 .2.3	Pembayaran Pokok Utang	339.231.149,00	0,00	339.231.149,00	339.231.149,00
6 .2.3.11	Pembayaran Pokok Utang	339.231.149,00	0,00	339.231.149,00	339.231.149,00
6 .2.3.11.01	Pembayaran Pokok Utang	339.231.149,00	0,00	339.231.149,00	339.231.149,00
	PEMBIAYAAN NETTO	70.122.028.149,00	0,00	70.803.412.526,81	70.803.412.526,81
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	103.320.481.813,65	103.320.481.813,65



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO.URUTURAIAN		ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN-LRA	1.002.290.180.811,00	1.049.569.061.025,26	104,72	733.242.018.371,
4 .1	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) -LRA	33.884.459.003,00	30.453.223.133,26	89,87	26.446.077.260,
4 .1.1	PendapatanPajak Daerah - LRA	6.562.427.884,00	6.503.992.499,00	99,11	4.693.774.307,
4 .1.2	PendapatanRetribusi Daerah - LRA	3.083.139.353,00	2.764.715.957,00	89,67	5.566.728.436,
4 .1.3	PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan - LRA	0,00	475.167.290,00	0,00	479.588.562,
4 .1.4	Lain-lainPAD YangSah - LRA	24.238.891.766,00	20.709.347.387,26	85,44	15.705.985.955,
4 .2	PENDAPATANTRANSFER-LRA	742.844.164.808,00	794.269.689.546,00	106,92	606.434.178.111,
4 .2.1	PendapatanTransferPemerintah Pusat - LRA	690.359.716.057,00	736.693.624.975,00	106,71	504.651.158.603,
4 .2.1.1	BagiHasil Pajak - LRA	26.807.129.711,00	39.501.474.961,00	147,35	12.509.311.390,
4 .2.1.2	BagiHasil Bukan Pajak/SumberDayaAlam - LRA	2.189.592.000,00	2.153.079.264,00	98,33	1.679.015.213,
4 .2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	481.455.045.996,00	542.199.556.000,00	112,62	444.806.362.000,
4 .2.1.4	Dana Alokasi Khusus(DAK)- LRA	179.907.948.350,00	152.839.514.750,00	84,95	45.656.470.000,
4 .2.2	PendapatanTransferPemerintah Pusat - Lainnya- LRA	0,00	0,00	0,00	55.146.685.000,
4 .2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	0,00	0,00	0,00	55.146.685.000,
4 .2.3	PendapatanTransferPemerintah Daerah Lainnya - LRA	44.630.326.751,00	49.721.942.571,00	111,41	28.028.200.508,
4 .2.3.1	PendapatanBagi Hasil Pajak - LRA	44.630.326.751,00	49.721.942.571,00	111,41	28.028.200.508,
4 .2.4	BantuanKeuangan - LRA	7.854.122.000,00	7.854.122.000,00	100,00	18.608.134.000,
4 .2.4.1	BantuanKeuangan dari PemerintahDaerah Provinsi Lainnya - LRA	7.854.122.000,00	7.854.122.000,00	100,00	18.608.134.000,
4 .3	LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANGSAH -LRA	225.561.557.000,00	224.846.148.346,00	99,68	100.361.763.000,
4 .3.3	PendapatanLainnya - LRA	225.561.557.000,00	224.846.148.346,00	99,68	100.361.763.000,
5	BELANJA	822.849.542.449,65	761.974.221.809,00	92,60	606.557.660.091,
5 .1	BELANJAOPERASI	563.045.221.001,65	533.533.794.118,00	94,76	435.212.184.149,

5 .1.1	Belanja Pegawai	311.652.956.276,65	299.295.334.530,00	96,03	280.257.458.404,
5 .1.2	Belanja Barangdan Jasa	238.076.122.725,00	221.701.383.203,00	93,12	148.566.178.711,
5 .1.5	Belanja Hibah	11.492.000.000,00	11.350.614.629,00	98,77	3.554.761.089,
5 .1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.824.142.000,00	1.186.461.756,00	65,04	2.833.785.945,
5 .2	BELANJAMODAL	258.304.321.448,00	228.440.427.691,00	88,44	170.639.985.692,
5 .2.1	Belanja Modal Tanah	8.000.000.000,00	7.652.800.000,00	95,66	0,00
5 .2.2	Belanja Modal Peralatan danMesin	19.686.901.590,00	19.071.920.750,00	96,88	25.134.935.931,
5 .2.3	Belanja Modal Gedungdan Bangunan	41.337.726.258,00	37.851.795.400,00	91,57	55.191.508.510,
5 .2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan	189.072.193.600,00	163.665.207.541,00	86,56	89.882.243.251,

5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	207.500.000,00	198.704.000,00	95,76	431.298.000,00
5.3	BELANJATAKTERDUGA	1.500.000.000,00	0,00	0,00	705.490.250,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	0,00	705.490.250,00
6	TRANSFER	278.563.061.479,00	276.538.065.944,00	99,27	94.167.288.994,00
6.1	TRANSFERBAGI HASILPENDAPATAN	2.215.749.160,00	936.990.488,00	42,29	0,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.215.749.160,00	936.990.488,00	42,29	0,00
6.2	TRANSFERBANTUANKEUANGAN	276.347.312.319,00	275.601.075.456,00	99,73	94.167.288.994,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	275.555.220.555,00	274.874.733.070,00	99,75	93.441.099.661,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	792.091.764,00	726.342.386,00	91,70	726.189.333,00
	SURPLUS /(DEFISIT)	-99.122.423.117,65	11.056.773.272,26	-11,15	32.517.069.286,84
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAANPEMBIAYAAN	102.035.763.387,65	102.035.763.887,65	100,00	69.857.925.249,00
7.1.1	PenggunaanSiLPA	102.035.763.387,65	102.035.763.887,65	100,00	69.857.925.249,00
7.2	PENGELUARANPEMBIAYAAN	2.913.340.270,00	2.405.249.525,00	82,56	339.231.149,00
7.2.2	PenyertaanModal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
7.2.3	PembayaranPokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	339.231.149,00
7.2.8	PengembalianSisaDanaTransfer	463.340.270,00	0,00	0,00	0,00
7.2.9	PembayaranUtangJangkaPendek Lainnya	450.000.000,00	405.249.525,00	90,06	0,00
	PEMBIAYAANNETTO	99.122.423.117,65	99.630.514.362,65	100,51	69.518.694.100,00
	SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARAN(SILPA)	0,00	110.687.287.634,91	0,00	102.035.763.387,6

4	PENDAPATAN	1.134.071.008.055,00	0,00	1.113.718.707.253,
4 .1	PENDAPATANASLI DAERAH	75.041.209.295,00	0,00	74.664.741.692,
4 .1.1	PendapatanPajak Daerah	8.680.372.267,00	0,00	13.551.475.829,
4 .1.1.01	Pajak Hotel	56.421.360,00	0,00	550.000,
4 .1.1.01.09	HotelMelati Satu	56.421.360,00	0,00	550.000,
4 .1.1.02	PajakRestoran	1.227.437.360,00	0,00	2.387.366.017,
4 .1.1.02.01	Restoran	1.227.437.360,00	0,00	2.387.366.017,
4 .1.1.03	PajakHIburan	1.800.000,00	0,00	2.196.000,
4 .1.1.03.21	TontonanKeramaian di Kecamatan	1.800.000,00	0,00	2.196.000,
4 .1.1.04	PajakReklame	64.193.000,00	0,00	102.813.110,
4 .1.1.04.01	ReklamePapan/Bill Board/Videotron/Megatron	40.738.000,00	0,00	76.002.110,
4 .1.1.04.03	ReklameMelekat/Stiker	7.500.000,00	0,00	14.420.000,
4 .1.1.04.11	ReklameSeng	5.625.000,00	0,00	1.871.500,
4 .1.1.04.12	ReklameSpanduk/Umbul-Umbul	10.330.000,00	0,00	10.519.500,
4 .1.1.05	PajakPenerangan Jalan	2.629.205.000,00	0,00	4.073.458.197,
4 .1.1.05.01	PajakPenerangan Jalan PLN	2.629.205.000,00	0,00	4.073.458.197,
4 .1.1.06	PajakMineral Bukan Logam danBatuan	2.890.000.000,00	0,00	5.587.801.070,
4 .1.1.06.06	BatuGunung/Kali	2.850.000.000,00	0,00	5.557.120.070,
4 .1.1.06.09	TanahTimbun	40.000.000,00	0,00	30.681.000,
4 .1.1.08	PajakAirBawah Tanah	11.382.000,00	0,00	20.248.340,
4 .1.1.08.01	PajakAirBawah Tanah	11.382.000,00	0,00	20.248.340,
4 .1.1.11	PajakBumi danBangunan (PBB)	1.599.933.547,00	0,00	1.185.811.320,
4 .1.1.11.01	PBBSectorPerkotaan	358.780.935,00	0,00	256.653.692,
4 .1.1.11.02	PBBSectorPerdesaan	1.241.152.612,00	0,00	929.157.628,
4 .1.1.12	PajakBeaPerolehan Hak atasTanah danBangunan (BPHTB)	200.000.000,00	0,00	191.231.775,
4 .1.1.12.01	BPHTB- Pemindehan Hak	200.000.000,00	0,00	191.231.775,
4 .1.2	HasilRetribusi Daerah	16.462.445.262,00	0,00	12.523.583.485,
4 .1.2.01	RetribusiJasa Umum	14.889.267.400,00	0,00	10.696.317.376,
4 .1.2.01.01	RetribusiPelayanan Kesehatan - Puskesmas	568.468.500,00	0,00	277.909.500,

4 .1.2.01.07	RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan	124.312.000,00	0,00	90.450.000,
4 .1.2.01.19	RetribusiPelayanan ParkirDi Tepi Jalan Umum	174.240.000,00	0,00	106.057.000,
4 .1.2.01.20	RetribusiPelayanan Pasar - Pelataran	221.416.000,00	0,00	276.615.000,
4 .1.2.01.21	RetribusiPelayanan Pasar - Los	191.808.000,00	0,00	104.652.000,
4 .1.2.01.22	RetribusiPelayanan Pasar - Kios	302.040.000,00	0,00	164.599.500,
4 .1.2.01.25	RetribusiPKB - Mobil Penumpang - Minibus	23.790.000,00	0,00	8.105.500,
4 .1.2.01.45	RetribusiPelayanan Pasar - MCK	15.600.000,00	0,00	10.440.000,
4 .1.2.01.46	RetribusiPelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	4.741.000,
4 .1.2.02	RetribusiJasa Usaha	1.089.245.000,00	0,00	1.261.481.721,
4 .1.2.02.04	RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	622.500.000,00	0,00	760.449.000,
4 .1.2.02.17	RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	15.600.000,00	0,00	18.672.000,
4 .1.2.02.21	RetribusiTempat Rekreasi	15.000.000,00	0,00	15.444.000,
4 .1.2.02.23	RetribusiPelayanan Tempat Olahraga	24.000.000,00	0,00	0,00
4 .1.2.02.26	RetribusiPenjualan Produksi UsahaDaerah	14.935.000,00	0,00	4.560.000,
4 .1.2.02.29	RetribusiPengolahan Limbah CairIndustri	320.760.000,00	0,00	444.768.721,
4 .1.2.02.31	RetribusiRumah PotongHewan	24.150.000,00	0,00	12.738.000,
4 .1.2.02.32	RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah - Alat- AlatPertanian	52.300.000,00	0,00	4.850.000,
4 .1.2.03	RetribusiPerizinan Tertentu	483.932.862,00	0,00	565.784.388,
4 .1.2.03.01	RetribusiIzin Mendirikan Bangunan	250.027.571,00	0,00	367.478.203,
4 .1.2.03.03	RetribusiIzin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada OrangPribadi	2.000.000,00	0,00	198.306.185,00
4 .1.2.03.04	RetribusiIzin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	231.905.291,00	0,00	0,00
4 .1.3	HasilPengelolaanKekayaanDaerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	804.492.343,
4 .1.3.01	BagianLabaatasPenyertaan Modal padaPerusahaan MilikDaerah/BUMD	0,00	0,00	804.492.343,00
4 .1.3.01.01	BagianLabaAtasPenyertaan Modal Pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD	0,00	0,00	804.492.343,00
4 .1.4	Lain-lainPendapatanAsli Daerah yang Sah	49.898.391.766,00	0,00	47.785.190.034,
4 .1.4.02	PenerimaanJasa Giro	9.936.119.766,00	0,00	5.995.006.712,
4 .1.4.02.01	JasaGiro KasDaerah	9.929.710.845,00	0,00	5.884.228.096,
4 .1.4.02.02	JasaGiro PemegangKas	6.408.921,00	0,00	110.778.616,
4 .1.4.06	PendapatanDenda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	1.155.025.937,
4 .1.4.06.02	Bidang Kesehatan	0,00	0,00	3.722.400,
4 .1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	1.151.303.537,

4 .1.4.10.03	PendapatanDari Pengembalian Kelebihan Pembayaran GajidanTunjangan	0,00	0,00	4.831.800,00
4 .1.4.10.04	PendapatanDari Pengembalian Kelebihan Pembayaran PerjalananDinas	0,00	0,00	37.763.400,00
4 .1.4.18	Lain-lainPAD yangSah Lainnya	31.828.000.000,00	0,00	34.499.489.733,77
4 .1.4.18.01	Lain-lainPAD yangSah Lainnya	31.828.000.000,00	0,00	34.499.489.733,77
4 .1.4.22	PendapatanDanaKapitasi JKN	8.134.272.000,00	0,00	6.068.029.031,66
4 .1.4.22.01	PendapatanDanaKapitasi JKN	8.134.272.000,00	0,00	6.068.029.031,66
4 .2	DANAPERIMBANGAN	728.393.024.300,00	0,00	709.333.080.176,66
4 .2.1	BagiHasilPajak/BagiHasilBukanPajak	27.531.018.000,00	0,00	23.025.933.161,66
4 .2.1.01	BagiHasil Pajak	24.998.418.000,00	0,00	21.610.872.711,66
4 .2.1.01.01	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPertambangan	3.196.444.000,00	0,00	2.962.436.260,66
4 .2.1.01.03	BagiHasil dari Pajak Penghasilan OrangPribadi	7.589.856.000,00	0,00	6.462.477.572,66
4 .2.1.01.04	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPerkebunan	10.252.846.000,00	0,00	6.329.184.400,66
4 .2.1.01.05	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPerhutanan	47.743.000,00	0,00	134.394.600,66
4 .2.1.01.06	BagiHasil Cukai Hasil Tembakau	214.227.000,00	0,00	211.225.668,66
4 .2.1.01.07	Biaya Pemungutan PBB	669.852.000,00	0,00	573.454.239,66
4 .2.1.01.08	BagiHasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	3.027.450.000,00	0,00	4.937.699.972,66
4 .2.1.02	BagiHasil Bukan Pajak/SumberDayaAlam	2.532.600.000,00	0,00	1.415.060.450,66
4 .2.1.02.02	BagiHasil Dari Provisi SumberDayaHutan	699.482.000,00	0,00	638.656.830,66
4 .2.1.02.03	BagiHasil Dari DanaReboisasi	0,00	0,00	45.480.730,66
4 .2.1.02.07	BagiHasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	0,00	525.572.127,66
4 .2.1.02.08	BagiHasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	40.337.000,00	0,00	19.666.907,66
4 .2.1.02.09	BagiHasil Dari Pertambangan Gas Bumi	93.288.000,00	0,00	29.801.880,66
4 .2.1.02.10	BagiHasil Dari Pertambangan PanasBumi	16.857.000,00	0,00	21.117.460,66
4 .2.1.02.11	BagiHasil Dari Pertambangan Umum	189.512.000,00	0,00	134.764.516,66
4 .2.2	Dana Alokasi Umum	537.469.609.000,00	0,00	537.469.609.000,66
4 .2.2.01	Dana Alokasi Umum	537.469.609.000,00	0,00	537.469.609.000,66
4 .2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	537.469.609.000,00	0,00	537.469.609.000,66
4 .2.3	Dana AlokasiKhusus	163.392.397.300,00	0,00	148.837.538.015,66
4 .2.3.01	Dana Alokasi Khusus(DAK)	163.392.397.300,00	0,00	148.837.538.015,66
4 .2.3.01.01	DAKBidangPendidikan	5.649.754.000,00	0,00	5.493.700.000,66
4 .2.3.01.02	DAKBidangKesehatan	14.124.198.700,00	0,00	10.532.749.338,66

4 .2.3.01.09	DAKBidangPertanian	3.479.267.000,00	0,00	2.617.165.000,
4 .2.3.01.10	DAKBidangLingkungan Hidup	74.145.500,00	0,00	0,00
4 .2.3.01.21	DAKBidangInfrastrukturPembangunan Daerah	3.514.664.600,00	0,00	0,00
4 .2.3.01.22	DAKNon Fisik	71.118.838.000,00	0,00	64.222.483.077,
4 .2.3.01.23	DAKPenugasan BidangPasar	5.023.420.000,00	0,00	1.507.026.000,
4 .3	LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANGSAH	330.636.774.460,00	0,00	329.720.885.385,
4 .3.1	PendapatanHibah	0,00	0,00	760.000.000,
4 .3.1.01	PendapatanHibah Dari Pemerintah	0,00	0,00	760.000.000,
4 .3.1.01.01	PendapatanHibah Dari Pemerintah	0,00	0,00	760.000.000,
4 .3.2	Dana Darurat	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,
4 .3.2.01	PenanggulanganKorban/Kerusakan Akibat BencanaAlam	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,
4 .3.2.01.01	Korban/KerusakanAkibat BencanaAlam	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,
4 .3.3	Dana BagiHasilPajak DariProvinsidanPemerintah DaerahLainnya	34.554.863.460,00	0,00	33.830.116.376,00
4 .3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	34.554.863.460,00	0,00	33.830.116.376,
4 .3.3.01.01	BagiHasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.632.640.462,00	0,00	7.926.772.070,
4 .3.3.01.03	BagiHasil Dari BeaBalik NamaKendaraan Bermotor	3.439.110.675,00	0,00	2.983.518.217,
4 .3.3.01.05	BagiHasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.760.977.180,00	0,00	7.187.254.054,
4 .3.3.01.07	BagiHasil Dari Pajak Pengambilan danPemanfaatan AirPermukaan	1.052.884.340,00	0,00	1.000.236.124,00
4 .3.3.01.08	BagiHasil Tera Ulang	7.704.540,00	0,00	7.704.540,
4 .3.3.01.09	BagiHasil Pajak Rokok	13.661.546.263,00	0,00	14.724.631.371,
4 .3.6	PendapatanLainnya	288.081.911.000,00	0,00	287.130.769.009,
4 .3.6.01	PendapatanLainnya	288.081.911.000,00	0,00	287.130.769.009,
4 .3.6.01.01	PendapatanLainnya	288.081.911.000,00	0,00	287.130.769.009,
5	BELANJA	1.244.051.932.646,91	0,00	1.185.740.899.249,
5 .1	BELANJATIDAKLANGSUNG	650.205.395.582,91	0,00	628.420.760.443,
5 .1.1	BelanjaPegawai	305.149.474.633,91	0,00	289.605.607.925,
5 .1.1.01	Belanja GajidanTunjangan	225.380.347.025,91	0,00	221.674.324.278,
5 .1.1.01.01	GajiPokok PNS/UangRepresentasi	168.455.420.532,00	0,00	166.171.362.680,
5 .1.1.01.02	TunjanganKeluarga	16.292.951.300,00	0,00	15.795.368.464,

5 .1.1.01.08	PembulatanGaji	2.600.068,91	0,00	2.350.869,
5 .1.1.01.09	IuranAsuransi Kesehatan	4.826.472.000,00	0,00	4.756.837.246,
5 .1.1.01.10	Uang Paket	62.380.500,00	0,00	62.380.500,
5 .1.1.01.11	TunjanganPanitiaMusyawarah	22.761.375,00	0,00	22.761.375,
5 .1.1.01.12	TunjanganKomisi	40.970.475,00	0,00	40.970.475,
5 .1.1.01.13	TunjanganPanitiaAnggaran	22.761.375,00	0,00	22.761.375,
5 .1.1.01.14	TunjanganBadan Kehormatan	7.719.075,00	0,00	7.719.075,
5 .1.1.01.16	TunjanganPerumahan	2.171.000.000,00	0,00	2.171.000.000,
5 .1.1.01.17	Uang DukaWafat/Tewas	0,00	0,00	0,00
5 .1.1.01.19	Belanja PenunjangOperasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	0,00	200.350.000,
5 .1.1.01.21	TunjanganBadan Legilasi	13.260.975,00	0,00	13.260.975,
5 .1.1.01.22	TunjanganJKK	392.827.400,00	0,00	342.467.226,
5 .1.1.01.23	TunjanganJKM	435.041.600,00	0,00	428.082.409,
5 .1.1.01.24	TunjanganTransportasi DPRD	1.890.000.000,00	0,00	1.512.000.000,
5 .1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	76.256.126.408,00	0,00	64.922.283.647,
5 .1.1.02.01	TambahanPenghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14.505.000.000,00	0,00	11.235.657.507,
5 .1.1.02.08	TambahanPenghasilan Berdasarkan Kebijakan KhususLainnya	61.751.126.408,00	0,00	53.686.626.140,
5 .1.1.03	Belanja Penerimaan lainnyaPimpinan dananggotaDPRD sertaKDH/WKDH	3.513.001.200,00	0,00	3.009.000.000,00
5 .1.1.03.01	Belanja PenunjangKomunikasi Insentif Pimpinan Dan AnggotaDPRD	2.583.001.200,00	0,00	2.394.000.000,00
5 .1.1.03.02	Belanja PenunjangOperasional KDH/WKDH	300.000.000,00	0,00	300.000.000,
5 .1.1.03.03	Belanja Tunjangan ResesDPRD	630.000.000,00	0,00	315.000.000,
5 .1.4	BelanjaHibah	21.035.225.000,00	0,00	19.753.521.700,
5 .1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	21.035.225.000,00	0,00	19.753.521.700,
5 .1.4.05.01	BelanjaHibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	21.035.225.000,00	0,00	19.753.521.700,
5 .1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.124.142.000,00	0,00	1.285.570.000,
5 .1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat.....	2.124.142.000,00	0,00	1.285.570.000,
5 .1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada AnggotaMasyarakat	2.124.142.000,00	0,00	1.285.570.000,
5 .1.6	BelanjaBagiHasilKepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan PemerintahDesa	1.025.244.963,00	0,00	0,00
5 .1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	688.037.227,00	0,00	0,00
5 .1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.....	688.037.227,00	0,00	0,00

5 .1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/KotadanPemerintaha	320.371.308.986,00	0,00	317.355.847.818, 00
5 .1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	319.579.217.222,00	0,00	316.565.747.722, ^^
5 .1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.....	319.579.217.222,00	0,00	316.565.747.722, ^^
5 .1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	792.091.764,00	0,00	790.100.096, ^^
5 .1.7.05.01	BelanjaBantuanKepada PartaiPolitik	792.091.764,00	0,00	790.100.096, ^^
5 .1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	420.213.000, ^^
5 .1.8.01	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	420.213.000, ^^
5 .1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	420.213.000, ^^
5 .2	BELANJALANGSUNG	593.846.537.064,00	0,00	557.320.138.806, ^^
5 .2.1	Belanja Pegawai	48.800.139.300,00	0,00	47.365.252.235, ^^
5 .2.1.01	Honorarium PNS	16.501.085.000,00	0,00	15.609.138.000, ^^
5 .2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.881.085.000,00	0,00	13.114.646.000, ^^
5 .2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	540.720.000,00	0,00	525.532.000, ^^
5 .2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang Jasa	597.080.000,00	0,00	560.660.000, 00
5 .2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	1.482.200.000,00	0,00	1.408.300.000, ^^
5 .2.1.02	Honorarium Non PNS	24.213.258.300,00	0,00	23.983.564.535, ^^
5 .2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	24.149.133.300,00	0,00	23.919.439.535, ^^
5 .2.1.02.02	Upah Buruh/Karyawan	64.125.000,00	0,00	64.125.000, ^^
5 .2.1.03	Uang Lembur	1.140.196.000,00	0,00	982.239.700, ^^
5 .2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.126.452.000,00	0,00	972.495.700, ^^
5 .2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	13.744.000,00	0,00	9.744.000, ^^
5 .2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	94.200.000,00	0,00	94.200.000, ^^
5 .2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	94.200.000,00	0,00	94.200.000, ^^
5 .2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	86.800.000,00	0,00	77.260.000, ^^
5 .2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	86.800.000,00	0,00	77.260.000, ^^
5 .2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.990.400.000,00	0,00	1.844.650.000, ^^
5 .2.1.06.01	Moderator	14.250.000,00	0,00	13.500.000, ^^
5 .2.1.06.02	Honorarium Non Pegawai	1.976.150.000,00	0,00	1.831.150.000, ^^

5 .2.2.01.01	Belanja AlatTulisKantor	5.044.561.282,00	0,00	4.812.209.970,
5 .2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	42.154.000,00	0,00	41.447.000,
5 .2.2.01.03	Belanja AlatListrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	669.026.629,00	0,00	644.860.500,
5 .2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda PosLainnya	233.720.000,00	0,00	233.324.000,
5 .2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.076.870.108,00	0,00	1.049.847.049,
5 .2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	421.630.800,00	0,00	317.553.142,
5 .2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	810.000,00	0,00	810.000,
5 .2.2.01.09	Belanja Dokumentasi danDekorasi	512.672.800,00	0,00	464.719.000,
5 .2.2.01.10	Belanja BarangPakai HabisLainnya	3.462.164.105,00	0,00	3.321.450.379,
5 .2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.281.109.934,00	0,00	5.998.414.486,
5 .2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	115.700.000,00	0,00	114.700.000,
5 .2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	675.188.101,00	0,00	671.850.386,
5 .2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	237.580.000,00	0,00	237.475.000,
5 .2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.902.519.861,00	0,00	3.723.064.940,
5 .2.2.02.05	Belanja Bahan Kimiadan Pupuk	195.324.660,00	0,00	172.009.960,
5 .2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	157.210.000,00	0,00	123.505.000,
5 .2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek	102.465.700,00	0,00	97.864.900,
5 .2.2.02.08	Belanja Komponen Peralatan danPerlengkapan Kantor	350.380.000,00	0,00	347.485.000,
5 .2.2.02.09	Belanja Pakan Ternak	77.879.800,00	0,00	77.249.300,
5 .2.2.02.10	Upahtukang	1.500.000,00	0,00	1.500.000,
5 .2.2.02.11	Belanja Bahan Pameran	465.361.812,00	0,00	431.710.000,
5 .2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.814.294.705,00	0,00	25.516.627.044,
5 .2.2.03.01	Belanja Telepon	303.000.000,00	0,00	251.002.244,
5 .2.2.03.02	Belanja Air	48.200.000,00	0,00	15.506.930,
5 .2.2.03.03	Belanja Listrik	3.837.623.172,00	0,00	3.365.699.698,
5 .2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	896.687.000,00	0,00	854.029.999,
5 .2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TVKabel/TVSatelit	816.422.000,00	0,00	728.186.702,
5 .2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	74.675.000,00	0,00	45.888.000,
5 .2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	80.000.000,00	0,00	0,00
5 .2.2.03.12	Belanja Jasa Pemberitaan	805.504.000,00	0,00	739.584.000,
5 .2.2.03.13	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	255.500.800,00	0,00	232.055.000,
5 .2.2.03.14	Belanja jasa pelayanan kesehatan	22.434.252.742,00	0,00	16.338.952.388,
5 .2.2.03.16	Belanja jasa penyusunan danpembuatan buku/laporan	50.000.000,00	0,00	49.951.400,
5 .2.2.03.17	Belanja Administrasi Proyek	641.329.991,00	0,00	329.983.883,

5 .2.2.23.01	Belanja BarangYangAkan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.576.437.609,00	0,00	1.279.649.100,
5 .2.2.23.02	Belanja BarangYangAkan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.254.302.000,00	0,00	3.100.609.000,
5 .2.2.25	Belanja yangbersumberdari DanaKapitasu Jaminan KesehatanNasional	255.000.000,00	0,00	240.500.000,00
5 .2.2.25.01	Belanja yangbersumberdari DanaKapitasi Jaminan KesehatanNasional	255.000.000,00	0,00	240.500.000,00
5 .2.2.26	Belanja Transportasi danAkomodasi	18.518.041.950,00	0,00	16.528.978.002,
5 .2.2.26.01	Belanja Transportasi	14.683.588.650,00	0,00	13.436.441.312,
5 .2.2.26.02	Belanja Akomodasi	3.834.453.300,00	0,00	3.092.536.690,
5 .2.2.27	Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber	5.576.529.000,00	0,00	5.065.580.000,
5 .2.2.27.01	Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber	5.576.529.000,00	0,00	5.065.580.000,
5 .2.2.29	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	94.500.000,00	0,00	94.500.000,
5 .2.2.29.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	94.500.000,00	0,00	94.500.000,
5 .2.3	BelanjaModal	328.324.690.005,00	0,00	312.571.172.200,
5 .2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	16.500.000.000,00	0,00	14.823.679.000,
5 .2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	16.500.000.000,00	0,00	14.823.679.000,
5 .2.3.14	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-AlatBesarDarat	2.405.879.276,00	0,00	2.405.678.776,
5 .2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Compacting Equipment	2.387.879.276,00	0,00	2.387.878.776,
5 .2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPengangkat	18.000.000,00	0,00	17.800.000,
5 .2.3.16	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	86.000.000,00	0,00	85.500.000,
5 .2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan ElectricGenerating Set	50.000.000,00	0,00	49.500.000,00
5 .2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Pompa	36.000.000,00	0,00	36.000.000,
5 .2.3.17	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan AlatAngkutan DaratBermotor	8.193.329.000,00	0,00	7.087.343.973,00

5 .2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus	1.440.000.000,00	0,00	1.440.000.000,00
5 .2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua	971.520.000,00	0,00	727.511.650,00
5 .2.3.22	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatBengkelBermesin	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PerkakasKonstruksiLogam Terpasangpada Pondasi	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.23	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatBengkel TakBermesin	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.23.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PerkakasBengkelKonstruksiLogam	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.24	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkur	50.950.000,00	0,00	41.840.000,00
5 .2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkurUniversal	31.200.000,00	0,00	29.040.000,00
5 .2.3.24.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkur/TestKlinis Lain	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00
5 .2.3.24.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKalibrasi	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkur/Pembanding	15.750.000,00	0,00	9.000.000,00
5 .2.3.26	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPemeliharaanTanaman/AlatPenyimpan	100.100.000,00	0,00	95.550.000,00
5 .2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPenyimpanan	100.100.000,00	0,00	95.550.000,00
5 .2.3.27	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantor	1.968.854.500,00	0,00	1.785.875.800,00
5 .2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Mesin Ketik	17.880.000,00	0,00	17.660.000,00
5 .2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan MesinHitung/Jumlah	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPenyimpananPerlengkapanKantor	497.641.000,00	0,00	480.063.000,00
5 .2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantorLainnya	1.453.333.500,00	0,00	1.288.152.800,00
5 .2.3.28	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatRumah Tangga	7.989.307.475,00	0,00	6.337.274.957,00
5 .2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Meubelair	5.981.074.478,00	0,00	4.519.905.357,00

5 .2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Peralatan AntenaSHF/Parabola	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5 .2.3.33.23	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Program InputEquipment	18.531.592,00	0,00	18.530.000,00
5 .2.3.34	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKedokteran	11.142.630.000,00	0,00	10.808.264.300,00
5 .2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKedokteranUmum	3.130.630.000,00	0,00	3.080.053.500,00
5 .2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatanKebidandanPenyakit Kandungan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5 .2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKedokteranRadiologi	8.000.000.000,00	0,00	7.716.210.800,00
5 .2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKedokteranGawatDarurat	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5 .2.3.35	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatan	580.100.000,00	0,00	494.590.844,00
5 .2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatanPerawatan	515.100.000,00	0,00	455.084.344,00
5 .2.3.35.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKesehatanKedokteranKepolisian	65.000.000,00	0,00	39.506.500,00
5 .2.3.36	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Unit-Laboratorium	609.665.000,00	0,00	59.660.000,00
5 .2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumMicrobiologi	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
5 .2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumPertanian	4.665.000,00	0,00	4.660.000,00
5 .2.3.36.49	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumElektronika dan Daya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5 .2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumLainnya	550.000.000,00	0,00	0,00
5 .2.3.37	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPeraga/PraktekSekolah	112.000.000,00	0,00	107.700.000,00
5 .2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan BidangPendidikan/KetrampilanLain-lain	112.000.000,00	0,00	107.700.000,00
5 .2.3.43	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanLaboratoriumHidrodinamika	6.000.000,00	0,00	5.707.350,00
5 .2.3.43.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanLaboratoriumHidrodinamikaDataAccquistion andAnalyzingSystem	6.000.000,00	0,00	5.707.350,00

5 .2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	32.240.000,00	0,00	31.911.000,
5 .2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan AlatPerlindungan	35.960.000,00	0,00	33.925.000, 00
5 .2.3.49	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Kerja	47.520.423.214,00	0,00	43.397.150.200, 00
5 .2.3.49.01	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Kantor	26.863.993.000,00	0,00	26.729.399.550, 00
5 .2.3.49.06	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanKesehatan	3.336.439.500,00	0,00	3.290.742.500, 00
5 .2.3.49.08	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Ibadah	600.000.000,00	0,00	179.602.800, 00
5 .2.3.49.10	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat Pendidikan	10.757.543.000,00	0,00	10.755.607.000, 00
5 .2.3.49.12	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.762.729.450,00	0,00	2.242.697.350, 00
5 .2.3.49.27	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanGedung Tempat KerjaLainnya	199.718.264,00	0,00	199.101.000, 00
5 .2.3.51	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	67.000.000,00	0,00	67.000.000, 00
5 .2.3.51.03	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanMenara Telekomunikasi	67.000.000,00	0,00	67.000.000, 00
5 .2.3.53	Belanja Modal Gedungdan Bangunan -Pengadaan Bangunan TuguPeringatan	30.000.000,00	0,00	30.000.000, 00
5 .2.3.53.03	Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan BangunanTuguPeringatan Lainnya	30.000.000,00	0,00	30.000.000, 00
5 .2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan Jalan	169.418.309.024,00	0,00	166.063.693.700, 00
5 .2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota	169.418.309.024,00	0,00	166.063.693.700, 00
5 .2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan Jembatan	26.022.976.000,00	0,00	25.306.204.600, 00
5 .2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan JembatanKabupaten/Kota	26.022.976.000,00	0,00	25.306.204.600, 00
5 .2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan Bangunan AirIrigasi	3.860.483.237,00	0,00	3.853.951.600, 00
5 .2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan - Pengadaan BangunanPengambilanIrigasi	147.943.637,00	0,00	147.550.000, 00

5 .2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	6.947.430.000,00	0,00	6.775.668.000,00
5 .2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	563.499.000,00	0,00	549.984.000,00
5 .2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	563.499.000,00	0,00	549.984.000,00
5 .2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	7.567.000.000,00	0,00	7.467.244.475,00
5 .2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.567.000.000,00	0,00	7.467.244.475,00
5 .2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	400.000.000,00	0,00	199.578.000,00
5 .2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	400.000.000,00	0,00	199.578.000,00
5 .2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5 .2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5 .2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.900.000.000,00	0,00	1.869.592.350,00
5 .2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.900.000.000,00	0,00	1.869.592.350,00
5 .2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.85.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	31.222.000,00	0,00	31.222.000,00
5 .2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	31.222.000,00	0,00	31.222.000,00
5 .2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	114.800.000,00	0,00	114.570.000,00
5 .2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	114.800.000,00	0,00	114.570.000,00
5 .2.3.90	Belanja Modal Dana BOS	6.322.158.677,00	0,00	5.712.187.960,00
5 .2.3.90.01	Belanja Modal Dana BOS	6.322.158.677,00	0,00	5.712.187.960,00

4 .1.2.01.19	RetribusiPelayanan ParkirDi Tepi Jalan Umum	255.600.000,00	0,00	91.273.000,
4 .1.2.01.20	RetribusiPelayanan Pasar - Pelataran	375.000.000,00	0,00	242.096.000,
4 .1.2.01.21	RetribusiPelayanan Pasar - Los	140.952.000,00	0,00	77.457.000,
4 .1.2.01.22	RetribusiPelayanan Pasar - Kios	203.418.000,00	0,00	199.768.000,
4 .1.2.01.25	RetribusiPKB - Mobil Penumpang - Minibus	0,00	0,00	0,00
4 .1.2.01.37	RetribusiPenggantian BiayaCetak PetaPenyediaan PetaDasar(Garis)	0,00	0,00	35.640.000,00
4 .1.2.01.45	RetribusiPelayanan Pasar - MCK	15.600.000,00	0,00	7.830.000,
4 .1.2.01.46	RetribusiPelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	4.016.000,
4 .1.2.02	RetribusiJasa Usaha	2.042.257.000,00	0,00	1.069.639.048,
4 .1.2.02.04	RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	1.440.000.000,00	0,00	737.075.000,
4 .1.2.02.17	RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	30.000.000,00	0,00	26.825.000,
4 .1.2.02.21	RetribusiTempat Rekreasi	50.000.000,00	0,00	39.879.000,
4 .1.2.02.23	RetribusiPelayanan Tempat Olahraga	50.000.000,00	0,00	8.694.000,
4 .1.2.02.26	RetribusiPenjualan Produksi UsahaDaerah	36.903.000,00	0,00	14.200.000,
4 .1.2.02.28	RetribusiPengolahan Limbah CairPerkantoran	0,00	0,00	14.000.000,
4 .1.2.02.29	RetribusiPengolahan Limbah CairIndustri	350.000.000,00	0,00	218.436.048,
4 .1.2.02.31	RetribusiRumah PotongHewan	30.854.000,00	0,00	10.530.000,
4 .1.2.02.32	RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah - Alat- AlatPertanian	54.500.000,00	0,00	0,00
4 .1.2.03	RetribusiPerizinan Tertentu	650.580.855,00	0,00	789.308.599,
4 .1.2.03.01	RetribusiIzin Mendirikan Bangunan	648.580.855,00	0,00	789.308.599,
4 .1.2.03.04	RetribusiIzin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	0,00	0,00	0,00
4 .1.2.03.06	RetribusiPemberian Izin Trayek kepada Badan	2.000.000,00	0,00	0,00
4 .1.3	HasilPengelolaanKekayaanDaerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	1.618.407.595,
4 .1.3.01	BagianLabaatasPenyertaan Modal padaPerusahaan MilikDaerah/BUMD	0,00	0,00	1.618.407.595,00
4 .1.3.01.01	BagianLabaAtasPenyertaan Modal Pada Perusahaan MilikDaerah/BUMD	0,00	0,00	1.618.407.595,00
4 .1.4	Lain-lainPendapatanAsli Daerah yang Sah	56.679.258.291,79	0,00	45.880.574.081,
4 .1.4.02	PenerimaanJasa Giro	9.996.386.296,00	0,00	3.390.989.644,
4 .1.4.02.01	JasaGiro KasDaerah	9.989.977.375,00	0,00	3.207.070.386,
4 .1.4.02.02	JasaGiro PemegangKas	6.408.921,00	0,00	183.919.258,
4 .1.4.04	TuntutanGanti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	0,00	14.725.000,
4 .1.4.04.02	KerugianBarang	0,00	0,00	14.725.000,

4 .1.4.06	PendapatanDenda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	560.930.208,
4 .1.4.06.02	Bidang Kesehatan	0,00	0,00	919.695,
4 .1.4.07	PendapatanDenda Pajak	2.224.257,00	0,00	18.791.348,
4 .1.4.07.11	PendapatanDenda Pajak Bumi danBangunan Pedesaan danPerkotaan	2.224.257,00	0,00	18.791.348,00
4 .1.4.10	PendapatanDari Pengembalian	0,00	0,00	288.157.010,
4 .1.4.10.03	PendapatanDari Pengembalian Kelebihan Pembayaran GajidanTunjangan	0,00	0,00	33.683.010,00
4 .1.4.10.04	PendapatanDari Pengembalian Kelebihan Pembayaran PerjalananDinas	0,00	0,00	254.474.000,00
4 .1.4.18	Lain-lainPAD yangSah Lainnya	5.469.364.468,79	0,00	3.395.742.083,
4 .1.4.18.01	Lain-lainPAD yangSah Lainnya	5.469.364.468,79	0,00	3.395.742.083,
4 .1.4.22	PendapatanDanaKapitasi JKN	8.759.670.543,00	0,00	6.630.178.376,
4 .1.4.22.01	PendapatanDanaKapitasi JKN	8.759.670.543,00	0,00	6.630.178.376,
4 .1.4.24	PendapatanDanaBOS	32.451.612.727,00	0,00	31.581.060.411,
4 .1.4.24.45	PendapatanDanaBOS Satuan Dinas	32.451.612.727,00	0,00	31.581.060.411,
4 .2	DANAPERIMBANGAN	708.421.975.178,00	0,00	700.703.635.068,
4 .2.1	BagiHasilPajak/BagiHasilBukanPajak	23.854.840.163,00	0,00	25.031.222.813,
4 .2.1.01	BagiHasil Pajak	19.934.401.163,00	0,00	21.207.959.679,
4 .2.1.01.01	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPertambangan	0,00	0,00	2.267.460.029,
4 .2.1.01.03	BagiHasil dari Pajak Penghasilan OrangPribadi	7.761.776.000,00	0,00	6.010.163.476,
4 .2.1.01.04	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPerkebunan	0,00	0,00	8.589.494.883,
4 .2.1.01.05	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan sektorPerhutanan	0,00	0,00	294.546.054,
4 .2.1.01.06	BagiHasil Cukai Hasil Tembakau	268.583.163,00	0,00	201.437.250,
4 .2.1.01.07	Biaya Pemungutan PBB	0,00	0,00	558.704.973,
4 .2.1.01.08	BagiHasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	0,00	0,00	3.235.257.970,
4 .2.1.01.09	BagiHasil dari Pajak Bumi danBangunan	11.904.042.000,00	0,00	50.895.044,
4 .2.1.02	BagiHasil Bukan Pajak/SumberDayaAlam	3.920.439.000,00	0,00	3.823.263.134,
4 .2.1.02.02	BagiHasil Dari Provisi SumberDayaHutan	773.909.000,00	0,00	289.710.397,
4 .2.1.02.07	BagiHasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	0,00	701.234.591,
4 .2.1.02.08	BagiHasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	33.137.000,00	0,00	29.255.886,
4 .2.1.02.09	BagiHasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	39.287.950,

4 .2.1.02.10	BagiHasil Dari Pertambangan PanasBumi	16.983.000,00	0,00	17.427.394,
4 .2.1.02.11	BagiHasil Dari Pertambangan Umum	2.153.383.000,00	0,00	2.746.346.916,
4 .2.2	Dana Alokasi Umum	537.455.568.015,00	0,00	537.455.568.015,
4 .2.2.01	Dana Alokasi Umum	537.455.568.015,00	0,00	537.455.568.015,
4 .2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	537.455.568.015,00	0,00	537.455.568.015,
4 .2.3	Dana Alokasi Khusus	147.111.567.000,00	0,00	138.216.844.240,

4 .2.3.01	Dana Alokasi Khusus(DAK)	147.111.567.000,00	0,00	138.216.844.240, ^^
4 .2.3.01.01	DAKBidangPendidikan	9.108.000.000,00	0,00	9.090.460.598, ^^
4 .2.3.01.02	DAKBidangKesehatan	19.681.000.000,00	0,00	17.038.511.007, ^^
4 .2.3.01.03	DAKPenugasan BidangJalan	22.288.000.000,00	0,00	21.759.034.000, ^^
4 .2.3.01.04	DAKPenugasan BidangIrigasi	6.673.000.000,00	0,00	6.621.433.000, ^^
4 .2.3.01.05	DAKBidangInfrastrukturAirMinum	1.013.000.000,00	0,00	996.612.000, ^^
4 .2.3.01.06	DAKBidangInfrastrukturSanitasi	1.900.000.000,00	0,00	1.895.250.000, ^^
4 .2.3.01.08	DAKBidangKelautan danPerikanan	796.000.000,00	0,00	714.948.250, ^^
4 .2.3.01.09	DAKBidangPertanian	3.219.000.000,00	0,00	0,00
4 .2.3.01.22	DAKNon Fisik	81.315.567.000,00	0,00	79.034.386.885, ^^
4 .2.3.01.23	DAKPenugasan BidangPasar	1.118.000.000,00	0,00	1.066.208.500, ^^
4 .3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH	289.333.988.875,00	0,00	288.256.877.057, ^^
4 .3.1	PendapatanHibah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4 .3.1.01	PendapatanHibah Dari Pemerintah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4 .3.1.01.01	PendapatanHibah Dari Pemerintah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4 .3.3	Dana BagiHasilPajak DariProvinsidanPemerintah DaerahLainnya	30.104.797.075,00	0,00	30.177.517.857, 00
4 .3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	30.104.797.075,00	0,00	30.177.517.857, ^^
4 .3.3.01.01	BagiHasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.064.541.963,00	0,00	5.064.541.963, ^^
4 .3.3.01.03	BagiHasil Dari BeaBalik NamaKendaraan Bermotor	1.832.214.524,00	0,00	1.832.214.524, ^^
4 .3.3.01.05	BagiHasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.744.119.468,00	0,00	7.744.119.468, ^^
4 .3.3.01.07	BagiHasil Dari Pajak Pengambilan danPemanfaatan AirPermukaan	73.389.523,00	0,00	73.389.523, 00
4 .3.3.01.08	BagiHasil Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
4 .3.3.01.09	BagiHasil Pajak Rokok	15.390.531.597,00	0,00	15.463.252.379, ^^
4 .3.5	Bantuan KeuanganDariProvinsi atau Pemerintah DaerahLainnya	6.000.000.000,00	0,00	5.850.167.000, 00
4 .3.5.01	BantuanKeuangan Dari Provinsi	6.000.000.000,00	0,00	5.850.167.000, ^^
4 .3.5.01.01	BantuanKeuangan Dari Provinsi	6.000.000.000,00	0,00	5.850.167.000, ^^
4 .3.6	PendapatanLainnya	252.229.191.800,00	0,00	252.229.192.200, ^^
4 .3.6.01	PendapatanLainnya	252.229.191.800,00	0,00	252.229.192.200, ^^
4 .3.6.01.01	PendapatanLainnya	252.229.191.800,00	0,00	252.229.192.200, ^^

5 .1.1.01.01	GajiPokok PNS/UangRepresentasi	172.121.170.116,00	0,00	170.833.198.116,
5 .1.1.01.02	TunjanganKeluarga	17.671.698.002,00	0,00	17.623.011.317,
5 .1.1.01.03	TunjanganJabatan	6.837.035.688,00	0,00	6.817.870.000,
5 .1.1.01.04	TunjanganFungsional	11.567.831.240,00	0,00	11.542.548.000,
5 .1.1.01.05	TunjanganFungsional Umum	2.811.020.002,00	0,00	2.798.483.000,
5 .1.1.01.06	TunjanganBeras	10.759.270.326,00	0,00	10.732.062.446,
5 .1.1.01.07	TunjanganPPH/Tunjangan Khusus	373.249.198,00	0,00	371.985.842,
5 .1.1.01.08	PembulatanGaji	2.627.857,50	0,00	2.587.357,
5 .1.1.01.09	IuranAsuransi Kesehatan	4.895.802.898,00	0,00	4.883.684.861,
5 .1.1.01.10	Uang Paket	57.204.000,00	0,00	57.204.000,
5 .1.1.01.11	TunjanganPanitiaMusyawarah	20.097.000,00	0,00	20.097.000,
5 .1.1.01.12	TunjanganKomisi	38.092.956,00	0,00	37.544.850,
5 .1.1.01.13	TunjanganPanitiaAnggaran	20.097.000,00	0,00	20.097.000,
5 .1.1.01.14	TunjanganBadan Kehormatan	7.125.300,00	0,00	7.125.300,
5 .1.1.01.15	TunjanganAlatKelengkapan Lainnya	7.536.375,00	0,00	6.394.500,
5 .1.1.01.16	TunjanganPerumahan	1.990.800.000,00	0,00	1.990.000.000,
5 .1.1.01.17	Uang DukaWafat/Tewas	143.640.000,00	0,00	0,00
5 .1.1.01.19	Belanja PenunjangOperasional Pimpinan DPRD	175.550.004,00	0,00	175.450.000,
5 .1.1.01.21	TunjanganBadan Legilasi	12.240.900,00	0,00	12.240.900,
5 .1.1.01.22	TunjanganJKK	425.151.160,00	0,00	423.939.599,
5 .1.1.01.23	TunjanganJKM	953.870.022,00	0,00	950.882.965,
5 .1.1.01.24	TunjanganTransportasi DPRD	4.592.400.000,00	0,00	4.592.000.000,
5 .1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	87.698.256.000,00	0,00	82.932.106.658,
5 .1.1.02.01	TambahanPenghasilan Berdasarkan Beban Kerja	29.843.400.000,00	0,00	27.831.881.118,
5 .1.1.02.07	TambahanPenghasilan Berdasarkan Kekhususan Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5 .1.1.02.08	TambahanPenghasilan Berdasarkan Kebijakan KhususLainnya	57.854.856.000,00	0,00	55.100.225.540,
5 .1.1.03	Belanja Penerimaan lainnyaPimpinan dananggotaDPRD sertaKDH/WKDH	5.025.000.000,00	0,00	4.983.500.000,00
5 .1.1.03.01	Belanja PenunjangKomunikasi Insentif Pimpinan Dan AnggotaDPRD	3.780.000.000,00	0,00	3.759.000.000,00
5 .1.1.03.02	Belanja PenunjangOperasional KDH/WKDH	300.000.000,00	0,00	290.000.000,
5 .1.1.03.03	Belanja Tunjangan ResesDPRD	945.000.000,00	0,00	934.500.000,
5 .1.4	BelanjaHibah	42.768.030.893,00	0,00	38.802.319.118,
5 .1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	42.768.030.893,00	0,00	38.802.319.118,
5 .1.4.05.01	BelanjaHibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	42.768.030.893,00	0,00	38.802.319.118,

5 .1.6	BelanjaBagiHasilKepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan PemerintahDesa	2.910.524.491,00	0,00	2.888.715.126,
5 .1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	794.749.923,00	0,00	784.160.406,
5 .1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.....	794.749.923,00	0,00	784.160.406,
5 .1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.115.774.568,00	0,00	2.104.554.720,
5 .1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.115.774.568,00	0,00	2.104.554.720, 00
5 .1.7	Belanja Bantuan KeuanganKepadaProvinsi/Kabupaten/KotadanPemerintaha	283.427.254.042,00	0,00	283.143.815.818, 00
5 .1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	282.635.162.278,00	0,00	282.351.830.918,
5 .1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.....	282.635.162.278,00	0,00	282.351.830.918,
5 .1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	792.091.764,00	0,00	791.984.900,
5 .1.7.05.01	BelanjaBantuanKepada PartaiPolitik	792.091.764,00	0,00	791.984.900,
5 .1.8	BelanjaTidakTerduga	500.000.000,00	0,00	318.549.000,
5 .1.8.01	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	318.549.000,
5 .1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	318.549.000,
5 .2	BELANJALANGSUNG	468.259.472.492,00	0,00	433.550.783.872,
5 .2.1	BelanjaPegawai	42.112.570.200,00	0,00	41.385.732.434,
5 .2.1.01	HonorariumPNS	8.674.368.000,00	0,00	8.400.253.000,
5 .2.1.01.01	HonorariumPanitiaPelaksanaKegiatan	6.966.860.000,00	0,00	6.819.521.000,
5 .2.1.01.02	HonorariumTim Pengadaan BarangDan Jasa	506.880.000,00	0,00	506.880.000,
5 .2.1.01.03	HonorariumPanitiaPenerimaHasil Pekerjaan /Pengadaan BarangJasa	418.910.000,00	0,00	340.810.000, 00
5 .2.1.01.04	HonorariumPNS Lainnya	781.718.000,00	0,00	733.042.000,
5 .2.1.02	HonorariumNon PNS	25.423.742.200,00	0,00	25.121.282.481,
5 .2.1.02.01	HonorariumPegawai Honorer/Tidak Tetap	25.422.942.200,00	0,00	25.120.482.481,
5 .2.1.02.02	UpahBuruh/Karyawan	800.000,00	0,00	800.000,
5 .2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.247.700.000,00	0,00	3.187.200.000,
5 .2.1.06.01	Moderator	10.500.000,00	0,00	10.500.000,

5 .2.2.23.01	Belanja BarangYangAkan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.686.190.400,00	0,00	2.621.468.457,
5 .2.2.23.02	Belanja BarangYangAkan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.708.415.780,00	0,00	5.427.536.280,
5 .2.2.25	Belanja yangbersumberdari DanaKapitasu Jaminan KesehatanNasional	230.000.000,00	0,00	229.600.000,00
5 .2.2.25.01	Belanja yangbersumberdari DanaKapitasi Jaminan KesehatanNasional	230.000.000,00	0,00	229.600.000,00
5 .2.2.26	Belanja Transportasi danAkomodasi	19.736.096.700,00	0,00	17.598.908.932,
5 .2.2.26.01	Belanja Transportasi	17.349.581.700,00	0,00	15.639.820.046,
5 .2.2.26.02	Belanja Akomodasi	2.386.515.000,00	0,00	1.959.088.886,
5 .2.2.27	Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber	7.258.330.000,00	0,00	6.698.118.440,
5 .2.2.27.01	Belanja Jasa TenagaAhli/Instruktur/Narasumber	7.258.330.000,00	0,00	6.698.118.440,
5 .2.2.29	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	210.490.000,00	0,00	192.490.000,
5 .2.2.29.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	210.490.000,00	0,00	192.490.000,
5 .2.3	BelanjaModal	206.917.942.293,00	0,00	196.036.175.259,
5 .2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.649.000.000,00	0,00	2.636.446.000,
5 .2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.649.000.000,00	0,00	2.636.446.000,
5 .2.3.14	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-AlatBesardarat	184.700.000,00	0,00	184.700.000,
5 .2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan CompactingEquipment	184.700.000,00	0,00	184.700.000,00
5 .2.3.16	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	650.000.000,00	0,00	0,00
5 .2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPengolahanAir Kotor	650.000.000,00	0,00	0,00
5 .2.3.17	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatAngkutan DaratBermotor	4.994.821.910,00	0,00	4.834.870.900,00
5 .2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Kendaraan DinasBermotor Perorangan	973.260.000,00	0,00	941.168.500,00
5 .2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatUkurLainnya	594.740.000,00	0,00	544.500.000,00

5 .2.3.24.11	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AnakTimbangan/Biasa	0,00	0,00	0,00
5 .2.3.25	Belanja Modal Peralatan danMesin -Pengadaan AlatPengolahan	67.225.000,00	0,00	34.600.000,00
5 .2.3.25.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPanen/Pengolahan	43.075.000,00	0,00	34.600.000,00
5 .2.3.25.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatLaboratoriumPertanian	24.150.000,00	0,00	0,00
5 .2.3.26	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPemeliharaanTanaman/AlatPenyimpan	123.770.000,00	0,00	123.270.000,00
5 .2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPenyimpanan	123.770.000,00	0,00	123.270.000,00
5 .2.3.27	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantor	2.340.609.861,00	0,00	2.035.501.000,00
5 .2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Mesin Ketik	11.920.000,00	0,00	11.920.000,00
5 .2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan MesinHitung/Jumlah	29.050.000,00	0,00	18.860.000,00
5 .2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPenyimpananPerlengkapanKantor	131.500.000,00	0,00	130.945.000,00
5 .2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatKantorLainnya	2.168.139.861,00	0,00	1.873.776.000,00
5 .2.3.28	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatRumah Tangga	4.503.191.723,00	0,00	4.177.676.300,00
5 .2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan Meubelair	2.753.806.599,00	0,00	2.573.805.700,00
5 .2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPengukurWaktu	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
5 .2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPembersih	657.080.000,00	0,00	633.187.800,00
5 .2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatPendingin	651.126.124,00	0,00	576.351.000,00
5 .2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatDapur	7.689.000,00	0,00	7.632.000,00
5 .2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan AlatRumahTanggaLainnya(Home Use)	421.490.000,00	0,00	374.699.800,00
5 .2.3.29	Belanja Modal Peralatan danMesin - PengadaanKomputer	2.790.091.790,00	0,00	2.660.724.300,00
5 .2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan KomputerUnitJaringan	8.310.000,00	0,00	8.300.000,00
5 .2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PersonalKomputer	1.837.966.830,00	0,00	1.739.284.000,00
5 .2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan danMesin - Pengadaan PeralatanKomputer Mainframe	304.670.000,00	0,00	300.122.100,00

5 .2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.150.000.000,00	0,00
5 .2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.150.000.000,00	0,00
5 .2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	5.100.000,00	0,00
5 .2.3.84.10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan TarscaIt	5.100.000,00	0,00
5 .2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	156.000.000,00	0,00
5 .2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	150.000.000,00	0,00
5 .2.3.85.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	6.000.000,00	0,00
5 .2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.450.000,00	0,00
5 .2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.450.000,00	0,00
5 .2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	82.500.000,00	0,00
5 .2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	82.500.000,00	0,00
5 .2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	600.000.000,00	0,00
5 .2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	600.000.000,00	0,00
5 .2.3.90	Belanja Modal Dana BOS6)	11.122.440.000,00	0,00
5 .2.3.90.01	Belanja Modal Dana BOS	11.122.440.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	-38.032.273.029,71	0,00
6 .1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.413.288.306,71	0,00
6 .1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.413.288.306,71	0,00
6 .1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.413.288.306,71	0,00
6 .1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.413.288.306,71	0,00
6 .2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.381.015.277,00	0,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA : ERMA JUANDA HARAHAP
2. NIM : 0502173425
3. TEMPAT TANGGAL LAHIR : BATANG BARUHAR JULU, 16 JULI 1999
4. PEKERJAAN : MAHASISWA
5. ALAMAT : DESA BATANG BARUHAR JULU

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 10101340 Batang Baruhar Julu Tahun 2012
2. Tamatan MtsS Al-Mukhtariyah Sungai Dua Portibi Tahun 2014
3. Tamatan SMK Yayasan Pendidikan Padang Lawas Gunung Tua Tahun 2017
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. PRAMUKA H. Adam Malik – Hj Fatmawati UINSU
2. PPM Paluta (Perhimpunan Pemuda Mahasiswa Paluta)
3. E2AR English Economy Arabic Rabbani
4. MRI Act Padang Lawas Utara
5. KAMMI